

# DINAS KESEHATAN



# RENJA

RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2023



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2022



# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2023



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**2022**



RENCANA KERJA(RENJA)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2023

LAMPIRAN 2  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**2022**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 54 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor );
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor );
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

- sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
  7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III  
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan

23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 Juli 2022



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 54



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 60 Purwakarta 41115  
Telepon (0264) 206586 Faks. 211747 e\_mail : dinkes@purwakartakab.go.id  
Website : purwakartakab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/ 227 / Dinkes/ VII/2022

TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54)

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan           KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023
- PERTAMA           : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk tahun 2023.
- KEDUA             : Renja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.
- KETIGA             : Renja Dinas Kesehatan sebagaimana diatas berfungsi sebagai :  
a. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penetapan arah kebijakan Program dan Anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.  
b. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun APBD Kabupaten di lingkungan Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT           : Setiap Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan untuk membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program dan kegiatan.
- KELIMA             : Laporan kinerja sebagaimana butir KEEMPAT menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh bidang, secretariat, program maupun UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : di Purwakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,**  
  
**dr. H. Deni Darmawan, MARS**  
**NIP 197509132006041008**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) tahun 2023 merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan lampiran 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Oleh karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) ini diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa peningkatan kinerja dan capaian program.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 ini tentu bukan suatu yang sempurna tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran keinginan yang dicapai pada waktu yang akan datang. Adanya keterbatasan anggaran Kabupaten Purwakarta turut mempengaruhi penentuan prioritas dan arah kegiatan sehingga sulit untuk menyusun rencana kerja yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan.

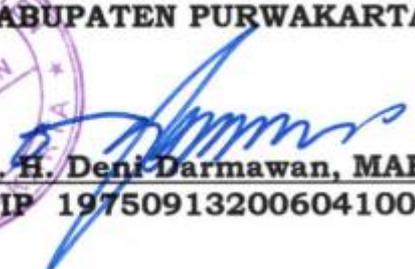
Disisi lain dengan telah ditetapkan Undang-Undang tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji dan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Hal ini menuntut perlunya advokasi, koordinasi dan sinergitas dalam peningkatan anggaran kesehatan sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber anggaran lain yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Sumber pembiayaan di luar APBD Kabupaten sesungguhnya tidak dapat dipertukarkan dengan APBD Kabupaten atau menggantikan peran APBD Kabupaten. Hal ini disebabkan sumber-sumber pembiayaan tersebut tidak bisa diharapkan menjadi sumber pembiayaan tetap, tidak bisa dipastikan kelangsungannya, tidak dapat diprediksi besaran, peruntukan, dan mekanisme pencairannya. Seringkali menu dan bentuk kegiatannya sudah ditentukan dan belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan di tingkat Kabupaten. Hal ini disebabkan sumber pembiayaan lain merupakan kebijakan yang bersifat global dan nasional sesuai tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan kebijakan bersifat internasional, nasional, maupun regional.

Dalam melaksanakan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 perlu keterlibatan semua pihak. Peran dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor termasuk stakeholder sangat penting. Hal ini mengingat masalah kesehatan disadari menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, saran perbaikan dan masukan akan berguna untuk kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangat kami harapkan untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 25 Juli 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,**  
  
**dr. H. Deni Darmawan, MARS**  
**NIP 197509132006041008**

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 54 TAHUN 2022<br/>TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.<br/>KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN<br/>PURWAKARTA NOMOR 050.1/227/DINKES/VII/2022 TENTANG<br/>RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.</b> |         |
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | i       |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | iii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | I-1     |
| 1.1 Latar Belakang   | I-1     |
| 1.2 Landasan Hukum   | I-3     |
| 1.3 Maksud dan Tujuan  | I-6     |
| 1.4 Sistematika Penulisan  | I-8     |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN<br/>TAHUN LALU</b>  | II-1    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra Dinas Kesehatan   | II-1    |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan   | II-17   |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas<br>Kesehatan  | II-23   |
| 2.4 Telaahan Usulan terhadap Rancangan Awal RKPD   | II-44   |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN</b>  | III-1   |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional   | III-1   |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan   | III-5   |
| 3.3 Program dan Kegiatan   | III-8   |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS<br/>KESEHATAN</b>  | IV-1    |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   | V-1     |

# BAB PENDAHULUAN

1

## 1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan penting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan

kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

- Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2023 “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**“ dimana Tema Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023 yaitu ”**PEMBANGUNAN PARIPURNA MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**”.

Adapun Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2023 yakni :

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan;
- 2) Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi;
- 3) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;
- 4) Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
- 5) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2023 diprioritaskan pada :

- 1) Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri;
- 2) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;
- 3) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, dan Strategis yang Terintegrasi;
- 4) Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing

Berdasarkan rancangan awal pada RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2023 maka secara umum kesehatan tidak tersurat atau disebutkan pada tema, program prioritas maupun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023,

tetapi tetap merupakan prioritas utama untuk pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purwakarta pada RKPD tahun 2023 maupun RPJMD tahun 2018-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5542)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
-

- Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor4);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  26. Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);
  27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ditetapkan dengan maksud

sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan pelaku pembangunan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan Tahun 2023 sesuai tugas dan fungsinya.
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta sesuai tahapan dalam Renstra Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Purwakarta.
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan bersifat indikatif Kabupaten Purwakarta dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian musrenbang
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA/DPA Tahun 2023
6. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 bertujuan :

1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk 1 (satu) tahun kedepan.
2. Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023.
3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar kebijakan kesehatan daerah dan pemerintah pusat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Purwakarta yang efektif, efisiensi, berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan inter dan antar bidang di Dinas Kesehatan dan Lintas Sektoral.

6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra 2019-2023 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023.
7. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KESEHATAN TAHUN LALU**

2

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan**

**2.1.1 Kondisi Umum Daerah**

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25' – 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Subang dan Kab. Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Bandung Barat dan Kab. Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Karawang, Kab. Cianjur dan Kab. Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Berikut adalah Gambar Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta :

**Gambar 2.1**  
**PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PURWAKARTA**



*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2012.*

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 476 dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN**  
**MENURUT KECAMATAN di KABUPATEN PURWAKARTA**

| No            | KECAMATAN    | LUAS WILAYAH  |               | JUMLAH DESA/KEL |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|               |              | KM2           | %             |                 |
| 1             | 2            | 3             | 4             | 5               |
| 1             | Jatiluhur    | 60,11         | 6,19          | 10              |
| 2             | Sukasari     | 92,01         | 9,47          | 5               |
| 3             | Maniis       | 71,64         | 7,37          | 8               |
| 4             | Tegalwaru    | 73,23         | 7,54          | 13              |
| 5             | Plered       | 31,48         | 3,24          | 16              |
| 6             | Sukatani     | 95,43         | 9,82          | 14              |
| 7             | Darangdan    | 67,39         | 6,94          | 15              |
| 8             | Bojong       | 68,69         | 7,07          | 14              |
| 9             | Wanayasa     | 56,55         | 5,82          | 15              |
| 10            | Kiarapedes   | 52,16         | 5,37          | 10              |
| 11            | Pasawahan    | 36,96         | 3,80          | 12              |
| 12            | Pondoksalam  | 44,08         | 4,54          | 11              |
| 13            | Purwakarta   | 24,83         | 2,56          | 10              |
| 14            | Babakancikao | 42,40         | 4,36          | 9               |
| 15            | Campaka      | 43,60         | 4,49          | 10              |
| 16            | Cibatu       | 54,66         | 5,63          | 10              |
| 17            | Bungursari   | 56,50         | 5,81          | 10              |
| <b>JUMLAH</b> |              | <b>971,72</b> | <b>100,00</b> | <b>192</b>      |

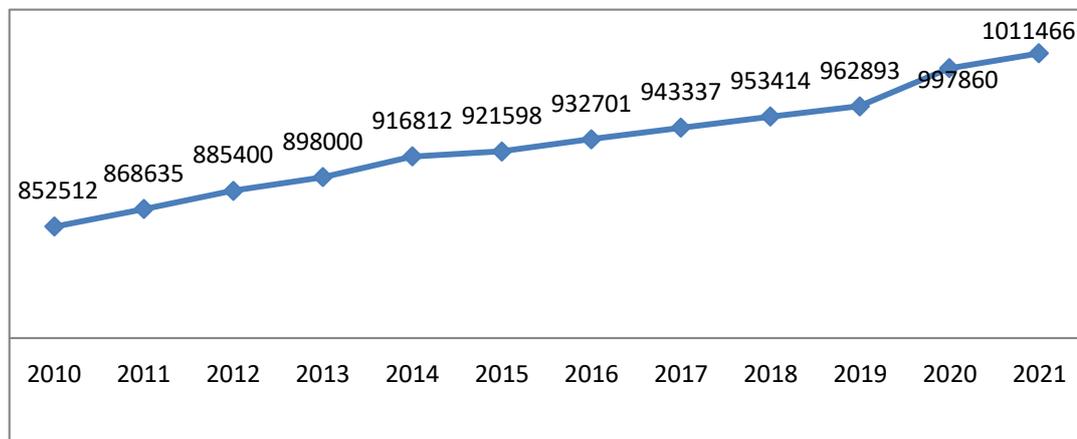
*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2019*

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat di kelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

- a. Wilayah Pegunungan  
Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;
- b. Wilayah Perbukitan  
Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;
- c. Wilayah Dataran  
Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Penduduk sebanyak 852.521 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105% yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Pada tahun 2019 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 962.893 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 953.414 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 943.337 dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.14% per tahun. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan kecamatan tahun 2010-2020, dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut ini :

**Grafik 2.1**  
**Pertambahan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2010 sampai dengan 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018,2020,2022  
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021  
 Badan Pusat Statistik kabupaten Purwakarta, tahun 2014  
 Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, tahun 2012

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a). Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. PDRB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implnsit). Indek harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017- 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2017-2021**

| No | PDRB                                     | Tahun     |           |           |           |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1. | Atas dasar harga berlaku (milyar)        | 58.529,83 | 63.072,83 | 67.571,87 | 67.176,20 | 70.787,50 |
| 2. | Atas dasar harga konstan 2010 (milyar)   | 42.239,30 | 44.344,27 | 46.281,71 | 45.293,24 | 46.840,15 |
| 3. | Laju Pertumbuhan Atas dasar konstan 2010 | 5,15      | 4,98      | 4,37      | -2,13     | 3,42      |

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Perbup No 48 Tahun 2022)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sektor perekonomian baik daerah, nasional bahkan global, dimana banyak para pelaku usaha industry mengalami keterpurukan dalam menjalankan usahanya akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan sehingga hal ini menurunkan daya beli masyarakat pada beberapa sektor industry, seperti pariwisata, otomotif, manufaktur, perhotelan, travel, perdagangan, transportasi dll. Hal ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas yang dapat mengancam keselamatan nyawa banyak seseorang. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan positif terhadap

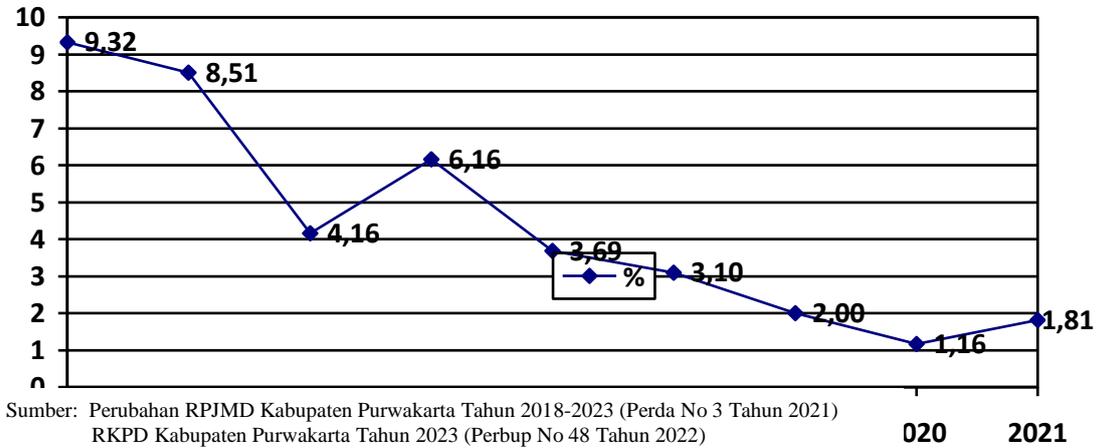
laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB di Kabupaten seiring dengan menurun dan melandainya kasus Covid-19 baik secara nasional maupun tingkat Kabupaten Purwakarta.

**b. Laju Inflasi**

Dalam ilmu ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain peristiwa dan bukan tinggirendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintahan. Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB.

Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta inflasi tahun 2019 mencapai angka 2,0 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,16 persen dan kembali meningkat tahun 2021 menjadi 1,81%. Berikut adalah grafik Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2021:

**Grafik 2.2**  
**Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2021**



**c). Kemiskinan**

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2021 dan target tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023**

| Indikator        | Satuan | 2019 |      | 2020 |      | 2021 |      | Target |      |
|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|                  |        | 8,7  | 7,48 | 7,91 | 8,27 | 7,77 | 8,83 | 7,63   | 7,48 |
| Angka Kemiskinan | Persen |      |      |      |      |      |      |        |      |

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)  
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Perbup No 48 Tahun 2022)

**Tabel 2.4**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021**

| NO | URAIAN                          | 2019    | 2020    | 2021      |
|----|---------------------------------|---------|---------|-----------|
| 1. | Jumlah Penduduk (juta jiwa)     | 962.890 | 997.870 | 1.011.466 |
| 2. | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)   | 71.860  | 80.170  | 84.270    |
| 3. | Persentase Penduduk Miskin      | 7,48    | 8,27    | 8,83      |
| 4. | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) | 367.273 | 378.287 | 387.754   |

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)  
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Perbup No 48 Tahun 2022)

**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis**  
**Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah**  
**Perbatasan Tahun 2019-2021**

| Uraian                     | Kabupaten         | Tahun 2019 | 2020      | 2021      |
|----------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk            | Kab. Purwakarta   | 962.893    | 997.869   | 1.011.466 |
|                            | Kab. Karawang     | 2.353.915  | 2.439.085 | 2.468.580 |
|                            | Kab. Subang       | 1.595.825  | 1.595.320 | 1.608.590 |
|                            | Kab. BandungBarat | 1.699.896  | 1.788.336 | 1.814.230 |
|                            | Kab. Cianjur      | 2.263.072  | 2.477.560 | 2.506.680 |
|                            | Kab. Bogor        | 5.965.410  | 5.427.068 | 5.489.540 |
| Jumlah Penduduk Miskin     | Kab. Purwakarta   | 71.860     | 80.170    | 84.270    |
|                            | Kab. Karawang     | 171.721    | 195.410   | 210.780   |
|                            | Kab. Subang       | 127.460    | 149.810   | 158.970   |
|                            | Kab. BandungBarat | 163.437    | 179.460   | 190.770   |
|                            | Kab. Cianjur      | 209.751    | 234.470   | 260.020   |
|                            | Kab. Bogor        | 395.000    | 465.670   | 491.240   |
| Persentase Penduduk Miskin | Kab. Purwakarta   | 7,48       | 8,27      | 8,83      |
|                            | Kab. Karawang     | 7,39       | 8,26      | 8,95      |
|                            | Kab. Subang       | 8,12       | 9,31      | 10,03     |
|                            | Kab. BandungBarat | 9,38       | 10,49     | 11,30     |
|                            | Kab. Cianjur      | 9,15       | 10,36     | 11,18     |
|                            | Kab. Bogor        | 6,66       | 7,69      | 8,13      |

|                                    |                    |         |         |         |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| Garis Kemiskinan<br>(Rp/Kap/Bulan) | Kab. Purwakarta    | 367.273 | 378.287 | 387.754 |
|                                    | Kab. Karawang      | 440.347 | 466.152 | 496.201 |
|                                    | Kab. Subang        | 339.607 | 351.885 | 360.691 |
|                                    | Kab. Bandung Barat | 341.307 | 362.212 | 374.470 |
|                                    | Kab. Cianjur       | 350.760 | 371.699 | 387.631 |
|                                    | Kab. Bogor         | 373.799 | 402.877 | 418.483 |

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)  
RKPd Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Perbup No 48 Tahun 2022)

Dalam rangka melindungi kesehatan penduduk miskin, maka setiap penduduk miskin didaftarkan sebagai peserta Jamkesmas (jaminan kesehatan Masyarakat) yang kemudian berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan data peserta PBI JKN tahun 2020 tercatat sebanyak 376.488 jiwa (43,61%) dari seluruh peserta JKN yang terdiri dari 292.428 jiwa PBI APBN dan 84.060 jiwa peserta PBI APBD Kabupaten Purwakarta. Jumlah peserta PBI JKN khususnya PBI APBN masih fluktuatif terkait dengan data kepesertaan itu sendiri, seperti adanya yang meninggal dan pemutakhiran data di lapangan. Data kepesertaan PBI JKN dan capaian JKN tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Peserta PBI JKN APBN dan APBD dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2018-2021**

| Peserta JKN                                | Tahun   |       |         |       |         |       |
|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|  | 2019    | %     | 2020    | %     | 2021    | %     |
| Peserta PBI JKN                            |         |       |         |       |         |       |
| PBI APBN                                   | 286.296 | 34,78 | 292.428 | 33,87 | 309.693 | 31,46 |
| PBI APBD                                   | 84.058  | 22,70 | 84.060  | 9,74  | 106.069 | 10,78 |
| Jumlah PBI                                 | 370.354 | 45,00 | 376.488 | 43,61 | 415.762 | 42,24 |
| Pekerja Penerima Upah (PPU)                | 263.780 | 27,4  | 281.284 | 28,9  | 295.672 | 30,04 |
| Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri | 180.582 | 18,8  | 163.695 | 16,8  | 157.198 | 15,97 |
| Bukan pekerja (BP)                         | 16.180  | 1,7   | 13.797  | 1,4   | 14.056  | 1,43  |
| Jamkesda/ JAMPIS                           |         |       |         |       |         |       |
| Jumlah seluruh Peserta JKN                 | 823.084 | 84,69 | 863.396 | 88,84 | 882.688 | 89,68 |

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JPK/ Profil Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

Dengan melihat data peserta PBI JKN dengan penduduk miskin menunjukkan PBI JKN jauh lebih tinggi yaitu 415.762 orang atau 42,24 persen dari jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 84.270 orang (8,83%) tahun 2021. Dengan demikian secara kuantitas seharusnya seluruh masyarakat miskin sudah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional. Namun dalam kenyataan di lapangan masih adanya keluhan penduduk miskin yang termasuk peserta PBI JKN, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga masyarakat tidak ada kesulitan dalam pelayanan kesehatan maupun penanganan ketika sakit, khususnya penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya sangat besar seperti penyakit katastropik antara lain kanker, cuci darah dan lain sebagainya.

Disisi lain, masyarakat seringkali terlena saat sehat dan tidak memikirkan biaya ketika sakit, sehingga akhirnya kesulitan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan maupun penanganan sakit dan penyakitnya. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya peserta JKN mandiri, dimana dimana masih cukup rendahnya kepesertaan masyarakat yaitu 15,97 persen pada Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri dan 1,43 persen pada bukan pekerja. Untuk itu perlu didorong kepesertaan mandiri pada masyarakat sehingga dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen, dimana tahun 2021 meningkat menjadi 89,68% dibandingkan 88,84%. tahun 2020. Diharapkan tahun 2022 Kabupaten Purwakarta bisa mencapai UHC minimal 95%.

#### **d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 ada peningkatan menjadi 70,98 atau meningkat 0,16. Nilai IPM Kabupaten Purwakarta tahun 2021 merupakan yang tertinggi dibanding 5 (lima) Kabupaten yang berbatasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2019-2023**

| Indikator                         | Satuan | 2019       |            | 2020       |            | 2021       |            | Target     |            |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   |        | Target     | Realisasi  | Target     | Realisasi  | Target     | Realisasi  | 2022       | 2023       |
| 1                                 | 2      | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| Indeks Pembangunan Manusia        | Poin   | 70,40      | 70,67      | 69,28      | 70,82      | 69,56      | 70,98      | 69,92      | 70,35      |
| Rata-Rata Lama Sekolah            | Tahun  | 8,08       | 7,92       | 7,91       | 8,09       | 7,97       | 8,10       | 8,04       | 8,12       |
| Angka Harapan Lama Sekolah        | Tahun  | 12,24      | 12,10      | 12,36      | 12,11      | 12,46      | 12,12      | 12,58      | 12,73      |
| Angka Harapan Hidup               | Tahun  | 70,65      | 70,8       | 70,58      | 70,99      | 70,63      | 71,18      | 70,68      | 70,75      |
| Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Rp     | 11.173.000 | 11.819.000 | 12.200.500 | 11.614.000 | 12.700.000 | 11.669.000 | 13.000.500 | 13.150.500 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2022 Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

### 2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Secara umum gambaran tingkat keberhasilan kinerja pembangunan disuatu daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana kesehatan merupakan salah satu *core bussineses* selain pendidikan dan daya beli. Indeks kesehatan menunjukkan derajat kesehatan pada daerah tersebut.

Pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2015-2018, dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja pada Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH/UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Perkembangan derajat kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI DAN IBU**  
**di KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016-2020**

| URAIAN      | TAHUN |      |      |      |      | PENYEBAB   |
|-------------|-------|------|------|------|------|--|
|             | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| a. Neonatal | 85    | 47   | 54   | 54   | 54   | asfiksia, BBLR, Sepsis, pneumonia, diare dan penyebab lainnya termasuk covid-19. |
| b. Bayi     | 99    | 57   | 72   | 72   | 67   |  |
| c. Balita   | 5     | 3    | 10   | 10   | 75   |  |
| d. Ibu      | 21    | 32   | 24   | 24   | 49   | Pendarahan, hipertensi dalam kehamilan dan penyebab lainnya.                     |

*Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kematian neonatal, bayi dan balita dalam kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. Sedangkan kasus kematian ibu masih cenderung fluktuatif, meskipun menurun tetapi kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2020 serta menurun kembali tahun 2019. Salah satu penyumbang cukup tinggi adalah kematian karena covid-19. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya adanya perbaikan baik dari sisi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat maupun masih belum optimalnya peran serta masyarakat serta dukungan lintas sektor, maupun stake holder lainnya. Upaya yang dilakukan seperti penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat termasuk ibu hamil, bayi dan balita perlu lebih ditingkatkan. Hal ini termasuk penjangkaran dan pelacakan bagi sasaran kesehatan yang tidak datang ke sarana pelayanan kesehatan, maupun masyarakat dengan mobilitas tinggi atau tidak tercatat dalam

data kependudukan, baik tingkat kader, desa maupun disdukcapil. Upaya mendorong masyarakat dan stakeholder untuk lebih berperan serta dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat harus menjadi gerakan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan.

Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2018, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.9**  
**DATA FASILITAS DAN UKBM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021**

| NO | FASILITAS DAN UKBM BIDANG KESEHATAN            | JUMLAH |
|----|--|--------|
| 1  | Rumah Sakit Negeri (Daerah)                    | 1      |
| 2  | Rumah Sakit Negeri (TNI)                       | 0      |
| 3  | Rumah Sakit Umum Swasta                        | 7      |
| 4  | Rumah Sakit Khusus Swasta                      | 0      |
| 5  | Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta                | 2      |
| 6  | Rumah Sakit Bersalin                           | 0      |
| 7  | Jumlah Puskesmas                               | 20     |
| 8  | Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) | 6      |
| 9  | Jumlah Puskesmas Pembantu                      | 43     |
| 10 | Jumlah Klinik Kesehatan                        | 125    |
| 11 | Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi            | 20     |
| 12 | Jumlah Poned                                   | 12     |
| 13 | Jumlah Saung Ambu                              | 8      |
| 14 | Jumlah Posyandu                                | 1043   |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta*

Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2019 telah membangun 6 unit Puskesmas Rawat Inap (DTP/dengan tempat perawatan) yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Maniis. Selanjutnya tahun 2020 melakukan renovasi dan peningkatan Puskesmas Bojong sehingga dapat menangani kegawatdaruratan di Puskesmas.

Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri 12 unit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang berlokasi di Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Plered, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Maniis dan Kecamatan Pondoksalam.

Sedangkan Realisasi capaian target Renja Dinas Kesehatan dilihat dari indikator output per kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dan indikator outcome masing-masing program dapat dinilai keberhasilannya berdasarkan Realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dari target yang ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja Renja 20221 terhadap target tahun 2017 pada Restra 2013-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

| NO       | Indikator Kinerja Utama   | Satuan | 2021   |           |        |
|----------|---|--------|--------|-----------|--------|
|          |   |        | Target | Realisasi | %      |
| <b>A</b> | <b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b> |        |        |           |        |
| 1        | Umur Harapan Hidup  | Indeks | 70,89  | 70,98     | 100    |
| 2        | Persentase kematian ibu   | %      | 0,12   | 0,27      | 45     |
| 3        | Persentase kematian bayi  | %      | 0,46   | 0,41      | 111    |
| 1        | Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial   | %      | 90     | 91,74     | 102    |
| 2        | Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja   | %      | 75     | 75,00     | 100    |
| 3        | Cakupan sarana farmasi yang dibina  | %      | 92     | 99        | 108    |
| 4        | Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri   | %      | 63,3   | 68,00     | 107    |
| 5        | Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS   | %      | 65,87  | 68,25     | 103,61 |
| 6        | Cakupan pelayanan anak balita   | %      | 78,57  | 70,72     | 90,01  |
| 7        | Cakupan pelayanan bayi  | %      | 98,8   | 98,8      | 100    |
| 8        | Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)   | %      | 75,95  |           | 0      |
| 9        | Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat  | %      | 59,14  | 53,92     | 91,17  |
| 10       | Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita DBD   | %      | 100    | 100       | 100    |
| 11       | Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap  | %      | 85,3   | 98,8      | 115,83 |
| 12       | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)  |        | 84,41  | 89,67     | 106,23 |
| 13       | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | %      | 50     | 93,2      | 186,4  |
| 14       | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin   | %      | 100    | 100       | 100    |
| 15       | Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan  | %      | 100    | 100       | 100    |
| 16       | Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik   | %      | 63,08  | 60        | 95,12  |
| 17       | Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina  | %      | 53,6   | 100       | 186,57 |
| 18       | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4  | %      | 99,14  | 101,02    | 101,90 |
| 19       | Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani   | %      | 75,23  | 97,85     | 130,06 |
| 20       | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan  | %      | 99,14  | 99,31     | 100,18 |
| 21       | Persentase Cakupan Pelayanan Individu, Keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat  |        | 80     | 68,25     | 85,31  |

| NO       | Indikator Kinerja Utama   | Satuan | 2021       |           |        |
|----------|---|--------|------------|-----------|--------|
|          |   |        | Target     | Realisasi | %      |
| 22       | Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya   | %      | 95         | 90        | 94,74  |
| 23       | Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)   | %      | 90         | 100       | 111,11 |
| 24       | Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda  | %      | 92,23      | 100       | 108,42 |
| 25       | Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku  | %      | 89,03      | 90        | 101,09 |
| <b>B</b> | <b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b> |        |            |           |        |
| 1        | Capaian SAKIP Perangkat Daerah  | Opini  | BB (75,90) | A (83,55) | 110    |
| 2        | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran  | %      | 75         | 60        | 80     |
| 3        | Rerata capaian SPM bidang kesehatan   | %      | 75         | 75        | 100    |
| 4        | Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial   | %      | 90         | 91,74     | 102    |
| 5        | Pemenuhan tenaga kesehatan minimal ( 9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar   | %      | 90         | 50        | 56     |
| 6        | Cakupan sarana farmasi yang dibina  | %      | 92         | 99        | 107    |
| 7        | Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri   | %      | 63         | 68        | 108    |
| <b>C</b> | <b>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Permenkes No 43 tahun 2019)</b>  |        |            |           |        |
| 1        | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | %      | 100        | 101,02    | 101,02 |
| 2        | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | %      | 100        | 97,56     | 97,56  |
| 3        | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | %      | 100        | 110,09    | 110,09 |
| 4        | Pelayanan Kesehatan Balita  | %      | 100        | 70,72     | 70,72  |
| 5        | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | %      | 100        | 31,74     | 31,74  |
| 6        | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | %      | 100        | 93,20     | 93,20  |
| 7        | Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut  | %      | 100        | 67,91     | 67,91  |
| 8        | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | %      | 100        | 59,94     | 59,94  |
| 9        | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | %      | 100        | 186,82    | 186,82 |
| 10       | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | %      | 100        | 81,02     | 81,02  |
| 11       | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB   | %      | 100        | 96,80     | 96,80  |
| 12       | Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV  | %      | 100        | 82,53     | 82,53  |

Hasil evaluasi capaian kinerja menunjukkan capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan capaian sasaran menunjukkan ada yang melebihi target yaitu persentase kematian bayi dan tidak mencapai target yaitu persentase kematian ibu. Sedangkan capaian program menunjukkan dari program teknis terdapat 1 (indikator) yang belum mencapai target dan 1 (satu) indikator dari program penunjang urusan pemerintahan daerah. Penyebab belum tercapainya indikator disebabkan fokusnya anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran, yang berdampak pengurangan maupun penangguhan anggaran yang lainnya. Selain itu masalah kematian ibu merupakan masalah yang kompleks bukan hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan semata namun berkaitan juga dengan sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu dukungan lintas sektor dan stakeholder termasuk keluarga, pasangan dan masyarakat sekitarnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

### **2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 3 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 5 ayat (2) menyatakan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan diuraikan pada pasal pasal 5 ayat (3) yaitu;

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
  1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
  2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
  3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
  1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
  2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas :

1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
  2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
  3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
  4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
  5. pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
- d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

- a. Kepala:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1). Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset; dan
  - 2). Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
  - 3). Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terbagi dalam dua jenis meliputi ;

1. UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini adalah Puskesmas sebanyak 20 puskesmas
  2. UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;
    - a) Laboratorium Kesehatan;
    - b) Perbekalan Kesehatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.2.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan**

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis meliputi sasaran tujuan, sasaran utama dan sasaran program. Pada sasaran tujuan terdapat 1 (satu) indikator, sasaran utama terdapat 2 (dua) indikator dan sasaran program terdapat 7 (tujuh) indikator, sehingga terdapat 10 (sepuluh) indikator yang diukur dalam penilaian kinerja di Dinas Kesehatan.

Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (70%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu 1 indikator sasaran dan 2 indikator program. Penyebab indikator yang belum mencapai disebabkan adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, disamping adanya pembatasan kontak pertemuan, larangan/pembatasan berkerumun/pertemuan, pembatasan pelayanan, termasuk turunya kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat, anggaran yang belum memadai serta data pelaporan yang belum optimal.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang berada pada sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.11  
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

| No | Sasaran strategis   | Indikator  | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | Realisasi | Persentase Tingkat Capaian | Ket   |
|----|---|--|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------|---|
| A  | Tujuan  |  |        |                                  |           |                            |   |
|    | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                   | Umur Harapan Hidup   | Indeks | 70,98                            | 70,98     | 100                        | Data sementara menunggu data resmi dari BPS |
| B  | Sasaran utama   |  |        |                                  |           |                            |   |
|    | Meningkatnya akseibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas          | 1 Persentase kematian ibu  | %      | 0,12                             | 0,27      | 45                         |   |
|    |   | 2 Persentase kematian bayi   | %      | 0,46                             | 0,41      | 111                        |   |
| C  | Sasaran Program :   |  |        |                                  |           |                            |   |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah                                   | opini  | BB (75,90)                       | A (83,55) | 110                        |   |
|    |   | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran             | %      | 75                               | 60,00     | 80                         |   |
| 2  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Rerata capaian SPM bidang kesehatan                              | %      | 75                               | 75,00     | 100                        |   |
|    |   | 2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial            | %      | 90                               | 91,74     | 102                        |   |
| 3  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 1 Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar | %      | 90                               | 50,00     | 56                         |   |
| 4  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 1 Cakupan sarana farmasi yang dibina                               | %      | 92,21                            | 99,00     | 107                        |   |
| 5  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 1 Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri                      | %      | 63                               | 68,00     | 108                        |   |

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran menunjukkan dari 25 (dua puluh lima) indikator terdapat 18 indikator (72%) yang mencapai 100% keatas, sebanyak 5 indikator (20%) mencapai 75-95% dan 2 indikator (8%) mencapai 50 s/d 70%.

Secara umum masih belum tercapainya target tersebut disebabkan antara lain anggaran yang terbatas dan adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran, fokus pelayanan dan penanganan covid-19, dan adanya larangan/pembatasan kerumunan termasuk pertemuan dan kontak langsung dengan sasaran sesuai dengan protokol kesehatan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada sisi pengelolaan data menunjukkan masih adanya data pelaporan yang manual dan belum terpantau secara optimal baik data sasaran maupun realisasi pelayanan.

Penyebab lainnya antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang atau melaporkan ke sarana pelayanan kesehatan, serta kurangnya keterampilan SDM kesehatan dalam melakukan pemeriksaan maupun melaksanakan sweeping/pelacakan dan penyisiran sasaran di masyarakat ataupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik, rumah sakit, dan sarana UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat) lainnya.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk mencari penyebab masalah dominan serta intervensi yang efektif. Karena kasus kematian ibu ini masih cenderung fluktuatif, sehingga belum ada penurunan kasus yang signifikan.

### **2.2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan**

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi

masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sedangkan berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.12  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021**

| NO | URAIAN   | SASARAN | REALISASI | %      |
|----|--|---------|-----------|--------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                          | 17.785  | 17.967    | 101,02 |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       | 16.976  | 16.562    | 97,56  |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    | 16.168  | 17.799    | 110,09 |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                             | 78.330  | 55.396    | 70,72  |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         | 161.167 | 51.153    | 31,74  |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                | 529.115 | 493.115   | 93,20  |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut                   | 99.865  | 67.819    | 67,91  |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | 231.691 | 138.881   | 59,94  |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | 11.962  | 22.347    | 186,82 |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | 1.338   | 1.084     | 81,02  |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB                    | 9.890   | 9.574     | 96,80  |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV | 12.768  | 10.537    | 82,53  |

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019 terhadap standar IKU maupun SPM, maka dapat dikatakan tingkat kinerja Dinas Kesehatan saat ini masih terdapat capaian yang dibawah target yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat dari capaian indikator kinerja program Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Hal ini disebabkan masih belum meratanya Sumber Daya Manusia Kesehatan baik kuantitas dan kualitas,

terbatasnya anggaran kesehatan serta masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat serta dukungan lintas sektor serta stakeholder.

### **2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan**

#### **a. Permasalahan**

- Distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan strategis yang belum memenuhi standar serta retensi SDM yang rendah.
- Terdapat ketidakselarasan prioritas pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan daerah terutama terkait pembagian kewenangan dan janji pemerintah daerah (Bupati/Gubernur)
- Sumber dan besaran anggaran yang tidak dapat diprediksi kepastian dan ketepatan waktunya, sehingga menyulitkan pengalokasian belanja kegiatan.
- Penyelenggaraan penganggaran pembangunan kesehatan yang masih berorientasi budget (*budget-based performance*) bukan bukan budget berorientasi kinerja (*performance-based budgeting*), menyebabkan pembiayaan tidak didasarkan pada analisis anggaran kesehatan kabupaten (*District Health Account*) yang tersebar di beberapa perangkat daerah.
- Kesehatan merupakan proyek investasi yang outcome maupun impactnya baru dapat dilihat dalam kurun waktu yang lama karena indikator yang digunakan untuk bidang kesehatan tidak bersifat fisik/kebendaan atau riil serta sangat multifaktor, contohnya perilaku dan derajat kesehatan.
- Belum dibentuknya atau belum efektifnya sistem kesehatan daerah
- Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi ditandai dengan masih sulitnya memperoleh data yang akurat dan tepat waktu.
- Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur karena terbatasnya sumber daya pendukungnya menyebabkan tidak optimalnya

kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat rujukan;

- Belum optimalnya promosi kesehatan, hal ini antara lain terlihat dari masih belum baiknya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan.
- Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan, masalah Gizi seperti stunting, penyakit menular dan tidak menular serta penyakit berbasis kesehatan lingkungan termasuk cakupan air bersih dan sanitasi dasar/ jamban sehat di masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Masih belum terlindunginya seluruh masyarakat (Universal Health Coverage) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

b. Hambatan

- Kemiskinan yang merupakan determinan sosial dari derajat kesehatan masyarakat belum ditangani secara komprehensif.
  - Kontribusi daerah dalam pembiayaan kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan minimal pelayanan kesehatan. Meskipun prosentase anggaran kesehatan kabupaten sudah mendekati 10% dari total APBD Kabupaten, namun lebih banyak disumbang non APBD Kabupaten, serta belum adanya analisis yang komprehensif tentang pemanfaatan anggaran tersebut untuk peningkatan capaian pelayanan kesehatan tersebut.
  - Pencapaian target universal coverage JKN belum didukung dengan penyediaan databased masyarakat miskin diluar kuota PBI serta belum terintegrasinya data masyarakat miskin tersebut.
  - Otonomi daerah termasuk dibidang kesehatan sangat tergantung pada *political will* Pimpinan Daerah dan PAD. Dukungan pemerintah pusat hanya sebagai stimulan sedangkan hak asasi kesehatan masyarakat merupakan *public good* yang merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi.
  - Tingginya peran politisi dalam pengambilan kebijakan menyebabkan perencanaan yang tidak obyektif dan evidence based.
-

- Masih kurangnya peran dan fungsi masyarakat khususnya kader, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat karena pendekatan peran serta yang dilaksanakan selama ini bersifat mobilisasi sehingga kegiatan tidak berkesinambungan.
- Dampak negatif dari globalisasi sehingga memberikan peluang masuknya tenaga kesehatan dan perusahaan jasa pelayanan kesehatan asing ke Indonesia dan kemungkinan bergesernya paradigma pelayanan kesehatan dari *public good* menjadi *market share*.
- Dampak negatif *climate change* dan *Global warming* karena pesatnya perkembangan industri terhadap perubahan kondisi lingkungan memungkinkan munculnya ancaman berbagai penyakit.
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor dalam perencanaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan yang sinergis, baik untuk kegiatan, sasaran, lokasi, waktu, maupun anggaran sehingga upaya penyelesaian masalah kesehatan yang multi dimensi cenderung tidak tuntas.

### **2.3.2 Dampak Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan SKPD terhadap pencapaian visi & misi kepala daerah dan terhadap pencapaian program nasional(SPM)/internasional (SDGs)**

Kesehatan merupakan satu dari tiga *basic core* Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta disamping pendidikan dan ekonomi. Oleh karenanya dalam mencapai visi pembangunannya Kepala Daerah menetapkan bidang kesehatan dalam Misi I RPJMD 2018-2023. Hambatan dan permasalahan kesehatan dalam bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, jaminan kesehatan serta kondisi lingkungan yang berpengaruh pada akses dan mutu pelayanan kesehatan tersebut akan berdampak pada lambatnya pencapaian misi I RPJMD serta program nasional yang diukur dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan percepatan pencapaian program internasional (SDGs).

Kinerja Dinas kesehatan ini secara tidak langsung menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta. Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan serta kewenangan pengelolaan keuangan menyebabkan puskesmas tidak fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan Ketidaktersediaan sumber daya yang memenuhi standar baik sarana prasarana maupun SDM maupun standar pelayanan yang kurang optimal memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terlebih lagi dengan rendahnya cakupan jaminan kesehatan menyebabkan masyarakat berfikir sekian kali untuk mengakses pelayanan kesehatan karena harus mengeluarkan biaya secara langsung (*out of pocket*). Terhadap semua dampak tersebut, Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat krusial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memelihara PHBS dan terlibat secara aktif dalam pembangunan kesehatan merupakan peran kunci dalam terwujud atau tidaknya peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan**

Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Kesehatan tak lepas dari berbagai tantangan dari lingkungan eksternal yang perlu dijawab dan direspon serta peluang yang dapat diraih untuk meningkatkan dan mempercepat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

#### **a. Tantangan**

- Laju pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kepadatan pemukiman
- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sementara kemampuan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan masih terbatas dan tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat sehingga sering menimbulkan “konflik” dalam pelayanan kesehatan.

- Munculnya masalah penyakit baru (*new emerging disease*), penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease*) dan pergeseran penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif sementara kasus penyakit infeksi masih tinggi (*double borden*).
- Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kesiapan sector kesehatan baik dari segi infrastruktur, SDM maupun manajemen. Serta Target untuk peleburan segala jenis jaminan kesehatan termasuk JAMPI ke dalam JKN mendorong perlunya dibuat strategi percepatan.
- Kecenderungan meningkatnya kasus non infectious disease berdampak pada meningkatnya pembiayaan kesehatan dan diperlukannya peningkatan PHBS dan perbaikan gaya hidup sehat
- Meningkatnya dana operasional puskesmas dari berbagai sumber termasuk kapitasi BPJS Kesehatan dan meningkatnya beban dalam pelayanan pengobatan di tingkat primer menyebabkan pergeseran fungsi puskesmas lebih ke arah kuratif dibandingkan preventif, terutama pengelolaan keuangan yang cenderung mengarah ke Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini mendorong diperlukannya perubahan manajemen puskesmas yang lebih professional
- Modernisasi mendorong budaya hidup masyarakat yang cenderung memiliki lifestyle yang negative dan individualis merupakan tantangan besar untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

b. Peluang

- Telah adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan di daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.
- Diterbitkannya berbagai regulasi terkait kesehatan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 7 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan dan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyediakan acuan dan standar yang kuat bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

- Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (JAMPI).
- Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023
- Budaya masyarakat yang mendukung kegiatan pembangunan kesehatan dimana masyarakat cukup terbuka dalam menerima perubahan dan perbaikan hidup dalam bidang kesehatan.
- Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf dan lama waktu sekolah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- Adanya anggaran pembangunan kesehatan dari berbagai sumber pembiayaan seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi (Bantuan Gubernur), APBN dengan biaya untuk masyarakat miskin langsung ke Puskesmas dan Dana alokasi khusus serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari Pemerintah untuk orang miskin dan rencana pengembangan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat serta anggaran operasional puskesmas dari berbagai sumber (BOK, Kapitasi BPJS).
- Rekrutment pegawai negeri sipil bagi tenaga kesehatan yang statusnya PTT, THL maupun melalui formasi umum telah dapat dilaksanakan di daerah.
- Meningkatnya jumlah peranan pelayanan kesehatan swasta maupun pengobatan tradisional, sumber daya pendukung termasuk tenaga dan anggaran.

- Berkembangnya institusi pendidikan yang merupakan asset mitra pembangunan kesehatan.
- Meningkatnya kepercayaan penanam modal di Kabupaten Purwakarta berdampak peningkatan PAD yang memungkinkan meningkatnya pembiayaan pembangunan sector kesehatan
- Kebijakan Kemenkes dan Provinsi Jawa Barat yang mendorong Akreditasi serta PPK-BLUD untuk Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik

### 2.3.4 Isu Kebijakan di Berbagai Level

Dalam rangka menjaga keselarasan dan sinergitas kebijakan dan program kesehatan serta pelaksanaannya di daerah maka berbagai isu penting terkait kesehatan yang berkembang dari berbagai jenjang pemerintahan perlu dipahami dan dijabarkan hingga tingkat daerah. Berikut adalah dinamika perkembangan isu kesehatan yang terjadi akhir akhir ini.

Tabel 2.13

| <b>IDENTIFIKASI DINAMIKA ISU-ISU PENTING BIDANG KESEHATAN DARI BERBAGAI LEVEL</b>  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Dinamika Internasional</b>  | <b>Dinamika Nasional</b>   | <b>Dinamika Regional (Jawa Barat)</b>  | <b>Lokal (Kabupaten Purwakarta)</b>  |
| Tujuan Pembangunan Dunia /Sustainable Development Goals (SDGs):<br><br>1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan<br>2. Menurunkan angka kematian anak<br>3. Meningkatkan kesehatan ibu<br>4. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya<br>5. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (termasuk ketersediaan air bersih) | Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN :<br><br>1. Meningkatkan status kesehatan rakyat Indonesia di setiap tahap kehidupan (dari bayi sampai Lansia)<br>2. Meningkatkan status gizi masyarakat<br>3. Peningkatan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih optimal<br>4. Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular<br>5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan | Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (Common Goals) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat :<br><br>1. Peningkatan Kualitas layanan Kesehatan<br>2. Peningkatan aksesibilitas layanan Kesehatan | Melanjutkan Program RPJMD Tahap Ke-3, Dengan Tekanan Pada:<br><br>1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat<br>2. Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa (JAMPI)<br>3. Pembangunan Puskesmas DTP di daerah sulit akses pelayanan rawat inap<br>4. Penanggulangan gizi buruk / Bank Gizi<br>5. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, pencegahan penyakit dan perbaikan lingkungan |

Dengan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diatas dan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, regional dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini yang cenderung belu beranjak dari issue tahun sebelumnya, maka isu strategis yang ditetapkan tersebut adalah :

**1. Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata sehingga utilitasnya belum optimal.**

Belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan rawat inap di daerah yang jauh dari perkotaan. Peta sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap saat ini masih terkonsentrasi di perkotaan berupa rumah sakit, maupun klinik. Sedangkan pembangunan puskesmas perawatan untuk mendekatkan akses perawatan saat ini baru ada 4 unit yang berlokasi di kecamatan diluar perkotaan dan 1 di wilayah pusat kota. Untuk menghadapi tantangan program Jaminan Kesehatan nasional dimana setiap warga Negara diharuskan terlindung oleh system jaminan kesehatan, sehingga diprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap akan semakin meningkat maka perlu pengembangan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya promosi dan diseminasi informasi yang lebih baik sehingga akan meningkatkan utilitas layanan rawat inap di puskesmas. Khusus untuk Puskesmas DTP Purwakarta, pertimbangan pembangunannya lebih upayakan untuk membagi peran rujukan kasus sederhana sehingga mengurangi beban perawatan di RSUD.

## **2. Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah**

Peningkatan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan tidak diiringi dengan kesiapan manajemen puskesmas dan sumber daya yang lain seperti SDM kesehatan, alat-alat kesehatan yang spesifik, Standar Operasional Prosedur (SOP). SDM kesehatan untuk beberapa kategori seperti dokter, dokter gigi, apoteker, ahli gizi, analis, sanitarian, kesehatan masyarakat dan perawat belum mencukupi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan tenaga bidan sudah terpenuhi kuantitasnya namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan pemerataan distribusinya. Beberapa tenaga kesehatan masyarakat masih banyak terdistribusi di Dinas Kesehatan dibandingkan di puskesmas. Disamping tenaga teknis bidang kesehatan, tenaga non kesehatan juga tak dapat diabaikan perannya dalam turut mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama tenaga akutansi dan informatika yang tidak tersedia di puskesmas sehingga harus memanfaatkan dan membebaskan tugasnya kepada tenaga fungsional kesehatan yang seharusnya dapat lebih focus terhadap pencapaian output SPM dibidangnya, terutama di level puskesmas. Hambatan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar yang berlaku akan menghambat pemenuhan tuntutan pelayanan yang berkualitas. Diantara sarana prasarana tersebut adalah desain dan ruangan puskesmas, system penanggulangan kebakaran dan kebisingan, kelistrikan dll yang belum terpenuhi di seluruh puskesmas. Upaya pemenuhan standar tersebut perlu segera dilaksanakan guna menunjang pelayanan yang bermutu.

## **3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi**

Semakin padatnya pemukiman, rendahnya kualitas air, dan udara akibat industry serta dampak dari pemanasan global berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan

---

merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi status kesehatan manusia sebesar 50% (teori H L Blum). Kondisi lingkungan yang buruk dan tidak diiringi dengan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat akan meningkatkan peluang meningkatnya penyakit menular disebabkan lingkungan (water borne disease, air borne disease maupun zoonosis).

#### **4. Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah daerah dalam Program JKN Belum Optimal**

Sumber pembiayaan kesehatan Kabupaten Purwakarta berasal dari APBN (DAK Fisik dan Non Fisik termasuk BOK untuk puskesmas), Bantuan Gubernur dari provinsi, APBD kabupaten maupun NGO namun masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran Dinas Kesehatan, sedangkan distribusi anggaran kesehatan di OPD lain tidak dapat diketahui dan belum terkoordinasikan dengan baik. Disamping itu, kebijakan pimpinan pemerintah daerah yang dominan dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan penganggaran mempengaruhi tingkat objektivitas perencanaan sehingga perencanaan yang *evidence-based* kurang optimal yang berakibat pada tidak tercapainya SPM terhadap cost yang sudah digulirkan.

Salah satu kebijakan pembiayaan kesehatan, digunakan untuk mendanai Program JAMPI. Pemanfaatan Jaminan kesehatan yang tersedia baik dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Purwakarta Istimewa (Jampi), Jaminan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat maupun Jamkesmas yang murni merupakan subsidi relative tinggi. Disisi lain program JKN mendorong masyarakat baik sektor formal maupun informal untuk memiliki jaminan kesehatan memberikan konsekuensi tuntutan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal ini akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap kesiapan berbagai sarana pelayanan kesehatan baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun manajemen. Dalam hal ini pemerintah selain perlu memikirkan penyediaan

---

jaminan bagi masyarakat kurang mampu diluar Jamkesmas juga harus memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dengan sistem pelayanan kesehatan maskin non kuota Jamkesmas berupa Jampi yang hanya mensyaratkan SKTM, maka pemafaatan dana akan sulit dikontrol, karena sistem data yang terbuka memungkinkan setiap orang dapat mengakses SKTM. Dengan demikian membuka peluang kecurangan yang berakhir pada pemborosan anggaran.

**5. Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum optimal**

Untuk mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, kesadaran dan keterlibatan secara aktif dari masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam suatu pembangunan kesehatan, manusia merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Dimulai dari pribadi, keluarga, kelompok/organisasi dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang terjadi saat ini masih pada taraf mobilisasi dan instruksi dari pemimpin wilayah dengan menetapkan regulasi. Program Desa Siaga belum dapat beroperasi secara aktif dan konsisten menjalankan forum desa siaga dengan programnya, sehingga masih perlu distimulus dengan penggerakan SMD dan MMD dari puskesmas. Disamping itu adanya kebijakan ambulan desa dimana segala bentuk operasionalnya ditanggung oleh Pemda, pada satu sisi sangat membantu masyarakat dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan terutama dalam hal rujukan pasien namun disisi lain menyebabkan kemandirian masyarakat sulit dirangsang dan justru meningkatkan ketergantungan kepada pihak pemerintah. Keberadaan berbagai industri dan institusi swasta yang diharapkan dapat menyokong pembangunan di wilayahnya melalui CSR belum dapat dilibatkan secara optimal. Hal ini masih terlihat dari kegiatan yang seharusnya dapat dialokasikan dari UKBM seperti

---

pembangunan, operasional dan PMT posyandu dan Lansia, masih selalu muncul melalui musrenbang untuk diusulkan ke Pemda melalui Dinas kesehatan. Optimalisasi kerjasama jejaring puskesmas (RS/RB/Klinik/Apotek/praktek swasta) dan stakeholder kesehatan lainnya juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersinergi menyelesaikan masalah kesehatan secara komprehensif.

**6. Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian ibu, bayi dan kasus gizi buruk serta angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan**

Capaian kinerja yang belum mencapai target dan rendahnya derajat kesehatan yang ditandai masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan kejadian gizi buruk merupakan manifestasi dari buruknya mutu pelayanan kesehatan.

Potret kesehatan saat ini sangat terkait dengan Pengalokasian anggaran yang tidak efektif dan diperburuk dengan pemahaman indicator kinerja dari pengelola program yang tidak dimaknai sebagai raport penilaian kinerja terhadap program yang sudah dilaksanakan dan didanai selama tahun berjalan, sehingga terjadi kecenderungan untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang monoton dan kurang tajam dari tahun ketahun tanpa memperhatikan dasar permasalahan yang dihadapi sebagai strategi mencapai indicator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Hal menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan belum dapat memberikan korelasi yang positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan

Terhadap Isu – isu penting maka ditetapkan formulasi kebijakan berupa rekomendasi sebagai solusi dan tindak lanjut melalui program dan prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. Kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap  
Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).
  
  - 2). Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP kesehatan  
Upaya pemenuhan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan, sarana prasarana yang memadai serta sumber daya kesehatan yang cukup secara kualitas dan kuantitas dan pembiayaan kesehatan ditujukan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam upaya mendorong peningkatan fungsi puskesmas maka dinas kesehatan terus mendorong peningkatan anggaran kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Tahun 2021 diharapkan anggaran
-

operasional puskesmas yang berasal dari berbagai sumber dapat dikelola lebih efektif dan efisien dengan peningkatan SDM yang handal. Upaya perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan ini juga dibarengi dengan penguatan perangkat regulasi dan standar operasional prosedur untuk menjamin pelayanan yang berkualitas serta mengutamakan pada fungsi penyelenggaraan upayan kesehatan Masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitative tanpa mengesampingkan upaya pelayanan Perorangan.

- 3). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk Desa Siaga dan swasta melalui *public private partnership*  
Perubahan perilaku merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan teladan yang nyata di lapangan serta pemeliharaan sikap. Perubahan perilaku kearah kemandirian hidup sehat atau PHBS bukan saja didorong berasal dari kesadaran masyarakat melalui pendidikan kesehatan maupun promosi kesehatan namun perlu didukung oleh faktor lingkungan yang memungkinkan (*enabling factor*) dan penekanan melalui regulasi (*reinforcing factor*) sehingga dengan sendirinya akan dirasakn manfaatnya dan menjadi gaya hidup yang positif. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada tokoh kunci di masyarakat, pihak swasta dan stake holder kesehatan lainnya.  
Salah satu wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif mensukseskan penyelenggaraan program kesehatan adalah Desa Siaga Sehat yang merupakan sinergitas dari berbagai program kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ketinggian desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat.
- 4). Penguatan fungsi, manajemen serta pengelolaan keuangan puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari *paradigma sakit menjadi paradigma sehat*. Sehingga pelayanan kesehatan dapat bergeser dari *pelayanan kuratif menjadi pelayanan promotif dan preventif* dengan tetap tidak meninggalkan pelayanan kuratif. Namun perkembangan kebijakan pemerintah daerah dan pusat mengenai jaminan kesehatan telah menempatkan porsi kuratif pada puskesmas semakin meningkat proporsinya. Hal ini perlu disiasati dengan pembenahan manajemen puskesmas, memilah bidang urusan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif dan bidang pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk preventif dan kuratif rehabilitatif. Hal ini untuk mengantisipasi dampak dari meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan karena telah meningkatnya jaminan kesehatan serta peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan keuangan puskesmas mengarah kepada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah dimana puskesmas diberikan kewenangan untuk mengatur pendapatan yang diperolehnya untuk jasa pelayanan dan operasional pelayanan. Untuk merespon masa transisi tersebut perlu dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan status puskesmas BLUD di Kabupaten Purwakarta.

- 5). Mendukung dan mempersiapkan pencapaian *universal coverage* atau Jaminan kesehatan Nasional  
Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak
-

dapat diprediksi seseorang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya yang besar. Masyarakat masih cenderung membayar pelayanan kesehatan secara cash (*fee for service*). Dengan demikian jaminan kesehatan dapat meningkatkan fungsi proteksi terhadap keuangan keluarga.

Pemerintah pusat menjamin biaya kesehatan penduduk miskin dengan Jamkesmas yang telah dileburkan ke dalam JKN bersama dengan peserta jaminan kesehatan dari Askes dan Jamsostek serta peserta yang berasal dari asuransi kesehatan lainnya pada tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta menjamin masyarakatnya yang diluar quota jamkesmas dengan program Jampi dimana ke depan akan dilakukan integrasi secara bertahap ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Permasalahan yang muncul adalah belum tervalidasinya datanya data sasaran program Jampi menjadi peserta JKN BPJS karena belum tersedianya data base kepesertaan masyarakat miskin diluar quota secara *by name by address*.

- 6). Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan memperhatikan siklus hidup.

Peningkatan derajat kesahatan memperhatikan determinan yang mepengaruhinya berupa lingkungan, perilaku, akses pelayanan kesehatan dan faktor keturunan serta determinan sosial. Hal ini bertujuan menurunkan kasus kematian ibu, bayi, balita, meningkatkan status gizi, terbebas dari penyakit menular dan dan tidak menular serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya kesehatan pada tiap siklus kehidupan memerlukan perlakuan yang

---

berbeda mulai dari bayi dalam kandungan, neonatal, bayi, balita, remaja, dewasa serta usia lanjut. Dengan demikian pendekatan intervensi yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan juga lebih spesifik memandang kebutuhan segi fisiologi sasaran.

Mencermati uraian diatas maka isu kesehatan, kebijakan, strategi, Program dan kegiatan prioritas dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.14**

**ISU-ISU PENTING, REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**

| <b>ISU – ISU PENTING</b>   | <b>REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>PROGRAM</b>  | <b>KEGIATAN PRIORITAS</b>   |
|--|--|--|---|---|
| Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata sehingga utilitasnya belum optimal. | Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap                                    | Meningkatkan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap<br><br>Pemenuhan sumber daya untuk pelayanan Puskesmas DTP | Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur<br><br>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya | Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL)<br><br>Pengadaan Meubelair dan alkes Puskesmas Rawat Inap  |
| Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah  | Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP kesehatan | Peningkatan ketersediaan sumber daya dan sarana di 20 puskesmas  | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya   | Perbaikan dan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), poskesdes dan rumah dinas Kendaraan Roda 2 bagi puskesmas (20 unit) Pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan pendukung Desa Siaga Sertifikasi Puskesmas dan Jaringannya dalam rangka implementasi Permenkes 43/2019 Pengadaan sarana penunjang Puskesmas (Genset, APAR, instalasi telepon) |
|  |  | Pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan primer   | Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan   | Akreditasi & Registrasi sarana dan tenaga kesehatan Akreditasi Puskesmas Persiapan akreditasi Labkesda  |

| ISU – ISU PENTING  | REKOMENDASI KEBIJAKAN  | STRATEGI  | PROGRAM   | KEGIATAN PRIORITAS   |
|--|--|---|---|--|
|  |  | Mencukupi ketersediaan dan menjamin kualitas dan keamanan obat, reagensia dan bahan habis pakai   | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan<br><br>Program Pengawasan obat dan makanan<br><br>Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Buffer Stock Obat Kabupaten Purwakarta<br><br>Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan konsumen/ Masyarakat di bidang obat, pangan dan bahan berbahaya<br><br>Kegiatan Pengadaan Reagensia dan alat laboratorium Kesehatan dan penunjang akreditasi Kalibrasi Alat Labkes |
|  | Penguatan fungsi manajemen serta pengelolaan keuangan puskesmas                            | Memetakan kembali ketenagaan dan menganalisis beban kerja tenaga kesehatan di puskesmas   | Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur  | Pelatihan Manajemen Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014   |
| Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian ibu, bayi dan kasus gizi buruk serta angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan | Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan memperhatikan daur hidup. | Meningkatkan pelayanan kesehatan wajib dan pengembangan baik didalam dan diluar gedung dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat  | Penunjang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Penunjang Administrasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas   |
|  |  | Peningkatan Manajemen pelayanan KIA, melalui :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Meningkatkan kapasitas tenaga KIA</li> <li>↳ Meningkatkan fungsi PONED dan Pemenuhan sarana KIA</li> <li>↳ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai KIA</li> </ul> | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak   | Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia KIA<br>Peningkatan Manajemen Pelayanan KIA KB<br>Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir  |
|  |  | Peningkatan manajemen penanggulangan masalah gizi   | Program Perbaikan Gizi Masyarakat   | Pencegahan dan Penanggulangan bayi dan balita gizi buruk, gizi kurang serta bumil  |

| ISU – ISU PENTING | REKOMENDASI KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | KEGIATAN PRIORITAS   |
|-------------------|-----------------------|--|---|--|
|                   |                       | masyarakat, melalui :<br>Penanganan kelompok rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan , penanggulangan gizi buruk dan intervensi gizi kurang dan gizi lebih |   | KEK melalui Bank Gizi Puskesmas<br>Penanggulangan gizi buruk melalui Pemberian Makanan Tambahan (BanProv)<br>Kewaspadaan Gizi bayi dan balita<br>Penanggulangan Gangguan Gizi akibat kekurangan Iodium (GAKI)<br>Pencegahana dan penanggulangan Anemia pada Remaja Putri di Sekolah  |
|                   |                       | Peningkatkan manajemen penanggulangan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, melalui penguatan surveillance penyakit dan PD3I  | Program Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular | Pelayanan Imunisasi<br>Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa<br>Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)<br>Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi jemaah haji<br>Penanggulangan bencana dibidang kesehatan<br>Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular<br>Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit TBC dan HIV-AIDS<br>Penanggulangan penyakit Filariasis(APBN)<br>RVS penyakit kusta di desa endemis dan OJT kusta bagi dokter Puskesmas<br>Pengadaan Kendaraan Ambulance TB MDR (BanGub) |
|                   |                       | Revitalisasi kemitraan di berbagai sektor  | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan         | Peningkatan Pelayanan Lansia<br>Pembinaan Pel. Kes Pengembangan<br>Pelayanan P3K ( Festival Budaya dalam rangka Hari Jadi Kab. Purwakarta ) dan Kesiagaan Hari Raya  |

| ISU – ISU PENTING   | REKOMENDASI KEBIJAKAN   | STRATEGI  | PROGRAM                                    | KEGIATAN PRIORITAS  |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | <p>dan Tahun Baru</p> <p>Pengelolaan perencanaan Sumber daya kesehatan dan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan</p> <p>Pengelolaan data informasi dan profil kesehatan</p> <p>Survey dan analisa data kesehatan</p> <p>Pengadaan sarana pendukung sistem informasi kesehatan</p> <p>Pemantauan, evaluasi dan penilaian capaian kinerja program dan kegiatan serta penyusunan lap. tahun</p> <p>Penyusunan Profil Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014</p> <p>Penyusunan Data based Standar sarana prasarana puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014</p> <p>Pengelolaan Persiapan Implementasi Permenkes No.75/2014</p> <p>Pengelolaan Perijinan puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes no.75/2014</p> |
| Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi | Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan<br>Perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif industri | Pengawasan kualitas lingkungan, inspeksi sarana sanitasi seperti air bersih, rumah pemukiman sehat, jamban sehat dan sarana pembuangan air limbah | Program Pengembangan Lingkungan Sehat      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyehatan Lingkungan Pemukiman</li> <li>- Penyehatan Sanitasi (TPM), (TU-I)</li> <li>- Pengawasan Kualitas Air</li> </ul>   |
|   |   |   |  | <p>Pengadaan dan Pembangunan IPAL puskesmas (APBN &amp; BanGub)</p> <p>Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)</p> <p>Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes 75/2014</p>   |
| <b>Pemberdayaan, peran serta masyarakat,</b>                | Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM   | Peningkatan kualitas dan sarana promosi kesehatan   | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | <p>Pembinaan PHBS Rumah Tangga</p> <p>Pengadaan sarana</p>  |

| ISU – ISU PENTING   | REKOMENDASI KEBIJAKAN  | STRATEGI  | PROGRAM                                     | KEGIATAN PRIORITAS   |
|---|--|---|---|--|
| pihak swasta dan Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum optimal                  | termasuk Desa Siaga dan swasta melalui <i>public private partnership</i>                         | Peningkatan kemitraan dengan sector terkait kesehatan<br>Penguatan partisipasi dan kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan sector swasta<br>Mengaktifkan desa siaga  | Masyarakat                                  | Promosi Kesehatan untuk penyuluhan<br>Revitalisasi Desa Siaga<br>Pelatihan Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat  |
| Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah daerah dalam Program JKN Belum Optimal | Mendukung dan mempersiapkan pencapaian <i>universal coverage</i> atau Jaminan kesehatan Nasional | meningkatkan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat<br>Mengintensifkan Persiapan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | - Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BanGub)<br>- Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Purwakarta Istimewa<br>- Pendampingan pengelolaan jminan kesehatan nasional (JKN)<br>- Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Kegiatan pengelolaan dana kapitasi JKN |

## 2.4 Telaahan Usulan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun setelah mendapatkan masukan dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta sebagai gambaran awal rencana kerja Kepala Daerah selama satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan kebijakan daerah dan permasalahan spesifik yang dihadapi. Disamping itu Rancangan awal RKPD mencakup usulan hasil kegiatan musrenbang dan rancangan awal Rencana Kerja OPD di seluruh Kabupaten Purwakarta. Terhadap RKPD ini selanjutnya perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk menselaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan dan mengakomodir amanat kebijakan kesehatan baik dari tingkat nasional atau Kementerian Kesehatan maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga perlu dilakukan untuk mengatur strategi pengalokasian dana yang tersedia dari berbagai sumber baik APBN, Bantuan Gubernur, maupun APBD Kabupaten dengan memperhatikan strategi

untuk mendapatkan *protective benefit* dan *positive benefits* sehingga dapat terhindar dari kemungkinan tidak teranggarkannya suatu kegiatan karena pengalokasian sumber dan waktu perencanaan yang kurang tepat. Disamping itu pula dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat atau tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan karena sumber daya manusia dan sarana prasarannya. Dengan demikian dapat dipilah program atau kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, karena tidak seluruh usulan yang disampaikan merupakan kebutuhan.

Tabel 2.15  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

| Kode |   |   |      |   | Rancangan Awal   |                |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |                |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|--|----------------|--|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan  | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 1 |      |   | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                   | 7  | 8              | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|      |   |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                |  |                |                     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                |  |                |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |                |  |                | 221.219.615.898     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |                |  |                | 201.462.276.744      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                |  |                | 70.659.632.629      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                |  |                | 99.452.295.744       |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                |  |                | 508.750.000         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                |  |                | 462.500.000          |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen      | 288.750.000         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen      | 262.500.000          |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Kab Purwakarta | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                | 2 dokumen      | 27.500.000          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Kab Purwakarta | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                | 2 dokumen      | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen      | 27.500.000          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen      | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD           | 2 Dokumen      | 27.500.000          | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD           | 2 Dokumen      | 25.000.000           |                 |

| Kode |   |   |      |   |   | Rancangan Awal   |  |                   |                       |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                   |                       |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|---|--|--|-------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian        | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian        | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | 2   | 3  | 4  | 5                 | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10                | 11                    | 12                   |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Kab Purwakarta   | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD   | 1 Laporan         | 27.500.000            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Kab Purwakarta  | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD   | 1 Laporan         | 25.000.000            |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Purwakarta   | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan         | 55.000.000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Purwakarta  | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan         | 50.000.000            |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab Purwakarta   | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 1 Laporan         | 55.000.000            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab Purwakarta  | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 1 Laporan         | 50.000.000            |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 1 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |  |                   | <b>56.084.329.376</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |  |                   | <b>50.985.753.979</b> |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab Purwakarta   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 578 orang/bulan   | 55.875.329.376        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab Purwakarta  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 578 orang/bulan   | 50.795.753.979        |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 5 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kab Purwakarta   | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | 1 Dokumen         | 66.000.000            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kab Purwakarta  | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | 1 Dokumen         | 60.000.000            |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab Purwakarta   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | 1 Laporan         | 77.000.000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab Purwakarta  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | 1 Laporan         | 70.000.000            |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 7 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Kab Purwakarta   | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan   | 1 Dokumen         | 38.500.000            | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Kab Purwakarta  | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan   | 1 Dokumen         | 35.000.000            |                      |                 |

| Kode |   |   |      |    | Rancangan Awal  |                |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|---|----------------|--|----------------|----------------------|---|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan                 | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.03 |    | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                    | 7   | 8              | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|      |   |   |      |    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab Purwakarta | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD | 1 Laporan      | 27.500.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab Purwakarta | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 1 Laporan      | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.03 | 5  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                |  |                | <b>55.000.000</b>    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                |  |                | <b>50.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 |    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Kab Purwakarta | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 55.000.000           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Kab Purwakarta | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 50.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 | 2  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                |  |                | <b>82.500.000</b>    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                |  |                | <b>75.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 | 11 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Kab Purwakarta | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan   | 1 Paket        | 55.000.000           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Kab Purwakarta | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan   | 1 Paket        | 50.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 |    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Kab Purwakarta | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan   | 1 Orang        | 27.500.000           | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Kab Purwakarta | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan   | 1 Orang        | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 1  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                |  |                | <b>1.143.500.000</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                |  |                | <b>1.040.000.000</b> |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Kab Purwakarta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 82.500.000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Kab Purwakarta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 75.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 3  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Kab Purwakarta | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | 1 Paket        | 55.000.000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Kab Purwakarta | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | 1 Paket        | 50.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 4  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Kab Purwakarta | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan  | 1 Paket        | 93.000.000           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Kab Purwakarta | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan  | 1 Paket        | 85.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 5  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab Purwakarta | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   | 1 Paket        | 220.000.000          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab Purwakarta | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   | 1 Paket        | 200.000.000          |                 |

| Kode |   |   |      |    |  | Rancangan Awal   |  |                   |                      |  | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                   |                      |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|--|--|--|-------------------|----------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    |  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp)  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 8  | 2  | 3  | 4  | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9  | 10                | 11                   | 12                   |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 8  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Kab Purwakarta   | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 1 Paket           | 220.000.000          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Kab Purwakarta  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 1 Paket           | 200.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 9  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kab Purwakarta   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu   | 1 Laporan         | 88.000.000           | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kab Purwakarta  | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu   | 1 Laporan         | 80.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kab Purwakarta   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 1 Laporan         | 275.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kab Purwakarta  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 1 Laporan         | 250.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 |    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Kab Purwakarta   | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen         | 110.000.000          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Kab Purwakarta  | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen         | 100.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 5  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |  |                   | <b>2.585.000.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |   |  |                   | <b>2.350.000.000</b> |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Mebel  | Kab Purwakarta   | jumlah paket mebel yang disediakan   | 20 unit           | 330.000.000          | Pengadaan Mebel  | Kab Purwakarta  | jumlah paket mebel yang disediakan   | 20 unit           | 300.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kab Purwakarta   | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                | 20 unit           | 110.000.000          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kab Purwakarta  | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                | 20 unit           | 100.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab Purwakarta   | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor   | 1 unit            | 825.000.000          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab Purwakarta  | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor   | 1 unit            | 750.000.000          |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 |    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Purwakarta   | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 20 unit           | 1.320.000.000        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Purwakarta  | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 20 unit           | 1.200.000.000        |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 | 2  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |  |                   | <b>3.971.803.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |   |  |                   | <b>3.610.730.000</b> |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab Purwakarta   | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 20 unit           | 1.111.803.000        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab Purwakarta  | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 20 unit           | 1.010.730.000        |                      |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 |    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab Purwakarta   | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | 20 unit           | 2.860.000.000        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab Purwakarta  | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | 20 unit           | 2.600.000.000        |                      |                 |

| Kode |   |   |      |    |  | Rancangan Awal  |                |  |                |                        | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |  |                |                       | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|--|---|----------------|--|----------------|------------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    |  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.)  |                 |
| 1    |   |   |      |    |  | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                      | 7   | 8              | 9  | 10             | 11                    | 12              |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 1  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |  |                | 6.228.750.000          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |  |                | 5.662.500.000         |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 9  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab Purwakarta | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 20 unit        | 288.750.000            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab Purwakarta | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 20 unit        | 262.500.000           |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 10 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kab Purwakarta | jumlah unit gedung kantor  | 1 unit         | 5.500.000.000          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kab Purwakarta | jumlah unit gedung kantor  | 1 unit         | 5.000.000.000         |                 |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 11 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Kab Purwakarta | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 1 unit         | 220.000.000            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Kab Purwakarta | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 1 unit         | 200.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 2 |      |    |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Kab Purwakarta | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         | 1 unit         | 220.000.000            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Kab Purwakarta | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         | 1 unit         | 200.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 |    |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                  |                |  |                | <b>133.953.695.769</b> | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                  |                |  |                | <b>86.943.856.000</b> |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 3  |  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         |                |  |                | <b>19.630.000.000</b>  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         |                |  |                | <b>17.300.000.000</b> |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 9  |  | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Kab Purwakarta | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun   | 3 unit         | 2.860.000.000          | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Kab Purwakarta | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun   | 3 unit         | 2.600.000.000         |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 13 |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Kab Purwakarta | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi   | 3 unit         | 7.150.000.000          | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Kab Purwakarta | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi   | 3 unit         | 6.500.000.000         |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 14 |  | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Kab Purwakarta | jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan   | 5 paket        | 1.100.000.000          | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Kab Purwakarta | jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan   | 5 paket        | 1.000.000.000         |                 |

| Kode |   |   |      |    |   | Rancangan Awal   |   |                   |                        |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |                   |                       |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|---|--|---|-------------------|------------------------|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja | Target Capaian         | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja | Target Capaian        | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 15 | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6                      | 7   | 8   | 9   | 10                | 11                    | 12                   |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 15 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Kab Purwakarta   | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | 1 paket           | 2.200.000.000          | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Kab Purwakarta  | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | 1 paket           | 2.000.000.000         |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Kab Purwakarta   | jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi   | 1 paket           | 550.000.000            | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Kab Purwakarta  | jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi   | 1 paket           | 500.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Obat. Vaksin  | Kab Purwakarta   | jumlah obat . vaksin yang disediakan  | 1 paket           | 3.500.000.000          | Pengadaan Obat. Vaksin  | Kab Purwakarta  | jumlah obat . vaksin yang disediakan  | 1 paket           | 3.000.000.000         |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Kab Purwakarta   | jumlah bahan habis pakai yang disediakan  | 1 paket           | 1.500.000.000          | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Kab Purwakarta  | jumlah bahan habis pakai yang disediakan  | 1 paket           | 1.000.000.000         |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 21 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Kab Purwakarta   | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | 1 paket           | 440.000.000            | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Kab Purwakarta  | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | 1 paket           | 400.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 |    | Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kab Purwakarta   | jumlah distribusi alat kesehatan. obat. vaksin. bahan medis habis pakai (BMHP)                          | 1 paket           | 330.000.000            | Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kab Purwakarta  | jumlah distribusi alat kesehatan. obat. vaksin. bahan medis habis pakai (BMHP)                          | 1 paket           | 300.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 1  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |   |                   | <b>113.663.695.769</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |   |                   | <b>69.043.856.000</b> |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 2  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Kab Purwakarta   | jumlah ibu hamil yang mendapatkan kesehatan sesuai standar  | 19300 orang       | 385.000.000            | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Kab Purwakarta  | jumlah ibu hamil yang mendapatkan kesehatan sesuai standar  | 19300 orang       | 350.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 3  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Kab Purwakarta   | jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                 | 18422 orang       | 330.000.000            | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Kab Purwakarta  | jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                 | 18422 orang       | 300.000.000           |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 4  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Kab Purwakarta   | jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                              | 17545 orang       | 330.000.000            | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Kab Purwakarta  | jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                              | 17545 orang       | 300.000.000           |                      |                 |

| Kode |   |   |      |    |  | Rancangan Awal   |  |                   |                |  | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                   |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|--|--|--|-------------------|----------------|--|---|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    |  | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    |   |   |      |    |  | 2  | 3  | 4                 | 5              | 6  | 7   | 8  | 9                 | 10             | 11                   | 12              |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 5  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           | Kab Purwakarta   | jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                | 87033 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           | Kab Purwakarta  | jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                | 87033 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 6  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       | Kab Purwakarta   | jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 48765 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       | Kab Purwakarta  | jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | 48765 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 7  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              | Kab Purwakarta   | jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | 48765 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              | Kab Purwakarta  | jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | 48765 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 8  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Kab Purwakarta   | jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                           | 23595 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Kab Purwakarta  | jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                           | 23595 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 9  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             | Kab Purwakarta   | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 52320 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             | Kab Purwakarta  | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 52320 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Kab Purwakarta   | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 12222 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Kab Purwakarta  | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                  | 12222 orang       | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Kab Purwakarta   | jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar      | 1361 orang        | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Kab Purwakarta  | jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar      | 1361 orang        | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       | Kab Purwakarta   | jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standarmendapatkan | 11117 orang       | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       | Kab Purwakarta  | jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standarmendapatkan | 11117 orang       | 300.000.000    |                      |                 |

| Kode |   |   |      |    |   | Rancangan Awal   |  |                   |                |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                   |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|---|--|--|-------------------|----------------|---|---|--|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    |   |   |      |    |   | 2  | 3  | 4                 | 5              | 6   | 7   | 8  | 9                 | 10             | 11                   | 12              |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Kab Purwakarta   | jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar   | 23109 orang       | 275.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Kab Purwakarta  | jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar   | 23109 orang       | 250.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 1 paket           | 12.500.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 1 paket           | 9.500.000.000  |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat   | 1 paket           | 1.100.000.000  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat   | 1 paket           | 1.030.000.000  |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga  | 1 paket           | 55.000.000     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga  | 1 paket           | 50.000.000     |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | 1 paket           | 330.000.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | 1 paket           | 300.000.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan   | 1 paket           | 27.500.000     | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan   | 1 paket           | 25.000.000     |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya                     | 1 paket           | 28.875.000     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya                     | 1 paket           | 26.250.000     |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan  | 1 paket           | 404.250.000    | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan  | 1 paket           | 367.500.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | Kab Purwakarta   | jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)  | 1361 orang        | 173.250.000    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | Kab Purwakarta  | jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)  | 1361 orang        | 157.500.000    |                      |                 |

| Kode |   |   |      |    | Rancangan Awal   |                |   |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |                |   |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|----|--|----------------|---|----------------|---------------------|--|----------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Lokasi         | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan                  | Lokasi         | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 23 | 2  | 3              | 4   | 5              | 6                   | 7  | 8              | 9   | 10             | 11                   | 12              |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   | Kab Purwakarta | jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa dan NAPZA  | 1361 orang     | 693.000.000         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   | Kab Purwakarta | jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa dan NAPZA  | 1361 orang     | 630.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 24 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus   | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus   | 1 paket        | 550.000.000         | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus   | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus   | 1 paket        | 500.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | 1 paket        | 220.000.000         | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | 1 paket        | 200.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular                           | 1 paket        | 173.250.000         | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular                           | 1 paket        | 157.500.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 27 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat   | 1 Dokumen      | 33.000.000.000      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Kab Purwakarta | Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat   | 1 Dokumen      | 30.049.380.000       |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                       | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah                       | 1 paket        | 330.000.000         | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                       | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah                       | 1 paket        | 300.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 31 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 1 dokumen      | 165.000.000         | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 1 dokumen      | 150.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan   | 0 Dokumen      | 150.000.000         | Pengelolaan Penelitian Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan   | 0 Dokumen      | 100.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 |    | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                     | Kab Purwakarta | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                       | 20 unit        | 110.000.000         | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                     | Kab Purwakarta | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                       | 20 unit        | 100.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 | 1  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>            |                |   |                | <b>330.000.000</b>  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>            |                |   |                | <b>300.000.000</b>   |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 | 2  | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 1 dokumen      | 55.000.000          | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 1 dokumen      | 50.000.000           |                 |

| Kode |   |   |      |   | Rancangan Awal  |                |   |                |                       | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |   |                |                       | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|---|----------------|---|----------------|-----------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi         | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.)  |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 | 3 | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                     | 7   | 8              | 9   | 10             | 11                    | 12              |
|      |   |   |      |   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 1 dokumen      | 55.000.000            | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 1 dokumen      | 50.000.000            |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 |   | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                     | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 7 unit         | 220.000.000           | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                     | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 7 unit         | 200.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 | 3 | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                |   |                | <b>330.000.000</b>    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                |   |                | <b>300.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Kab Purwakarta | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                | 1 unit         | 110.000.000           | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Kab Purwakarta | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                | 1 unit         | 100.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 3 |      |   | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                  | 1 dokumen      | 220.000.000           | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                  | 1 dokumen      | 200.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  |                |   |                | <b>15.319.287.500</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  |                |   |                | <b>13.926.625.000</b> |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 | 1 | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                      |                |   |                | <b>110.000.000</b>    | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                      |                |   |                | <b>100.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 | 2 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Perizinan praktik tenaga kesehatan  | 1 dokumen      | 55.000.000            | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Perizinan praktik tenaga kesehatan  | 1 dokumen      | 50.000.000            |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 |   | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan              | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | 2 dokumen      | 55.000.000            | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan              | Kab Purwakarta | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | 2 dokumen      | 50.000.000            |                 |

| Kode |   |   |      |   |   | Rancangan Awal   |   |                   |                |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |                   |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|---|--|---|-------------------|----------------|---|---|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi  | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    |   |   |      |   |   | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6   | 7   | 8   | 9                 | 10             | 11                   | 12              |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 1 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |  |   |                   |                | 14.984.062.500  | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |   |                   |                | 13.621.875.000       |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan          | 1 dokumen         | 55.308.000     | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                       | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan          | 1 dokumen         | 50.280.000     |                      |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 3 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Kab Purwakarta   | jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) | 412 orang         | 14.874.920.500 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Kab Purwakarta  | jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) | 412 orang         | 13.522.655.000 |                      |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 |   | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Kab Purwakarta   | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan                             | 2 dokumen         | 53.834.000     | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Kab Purwakarta  | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan                             | 2 dokumen         | 48.940.000     |                      |                 |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |   |                   |                | 225.225.000   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |   |                   |                | 204.750.000          |                 |
| 1    | 2 | 4 |      |   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Kab Purwakarta   | jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu/kompetensinya | 250 orang         | 225.225.000    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab Purwakarta  | jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu/kompetensinya | 250 orang         | 204.750.000    |                      |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 |   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   |  |   |                   |                | 622.000.000   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   |   |                   |                | 589.500.000          |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)            | Kab Purwakarta   |   |                   |                | 110.000.000   | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)            | Kab Purwakarta  |                   |                | 100.000.000          |                 |

| Kode |   |   |      |   | Rancangan Awal  |                |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|---|----------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.02 |   | 3   | 4              | 5  | 6              | 7                   | 8   | 9              | 10   | 11             | 12                   |                 |
|      |   |   |      |   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)             | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 dokumen      | 110.000.000         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)             | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 dokumen      | 100.000.000          |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.02 | 1 | <b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b> |                |  |                | <b>449.500.000</b>  | <b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b> |                |  |                | <b>439.500.000</b>   |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 |   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga          | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga    | 1 dokumen      | 449.500.000         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga          | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga    | 1 dokumen      | 439.500.000          |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 | 1 | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>                 |                |  |                | <b>35.000.000</b>   | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>                 |                |  |                | <b>25.000.000</b>    |                 |

| Kode |   |   |      |   | Rancangan Awal  |                |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|------|---|---|----------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.05 |   | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                   | 7   | 8              | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|      |   |   |      |   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 dokumen      | 35.000.000          | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 dokumen      | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 4 | 2.05 | 1 | <b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>  | Kab Purwakarta |  |                | <b>27.500.000</b>   | <b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>  | Kab Purwakarta |  |                | <b>25.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 5 |      |   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | 1 dokumen      | 27.500.000          | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | 1 dokumen      | 25.000.000           |                 |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   |                |  |                | <b>665.000.000</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   |                |  |                | <b>550.000.000</b>   |                 |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 | 1 | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                |  |                | <b>27.500.000</b>   | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                |  |                | <b>25.000.000</b>    |                 |
| 1    | 2 | 5 | 2.02 |   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan   | 1 dokumen      | 27.500.000          | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 1 dokumen      | 25.000.000           |                 |

| Kode |    |    |      |    |   | Rancangan Awal   |  |                   |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |                |  |                |                      | Catatan Penting |  |
|------|----|----|------|----|---|--|--|-------------------|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan   | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |  |
| 1    |    |    |      |    |   | 2  | 3  | 4                 | 5              | 6                   | 7   | 8              | 9  | 10             | 11                   | 12              |  |
|      |    |    |      |    |   |  |  | Masyarakat        |                |                     |   |                |  |                |                      |                 |  |
| 1    | 2  | 5  | 2.02 | 1  | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |                   |                | 610.000.000         | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |  |                | 500.000.000          |                 |  |
| 1    | 2  | 5  | 2.02 | 2  | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Kab Purwakarta   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 1 dokumen         |                | 110.000.000         | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 1 dokumen      |                      | 100.000.000     |  |
| 1    | 2  | 5  | 2.03 |    | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kab Purwakarta   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 Keluarga        |                | 500.000.000         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kab Purwakarta | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 Keluarga     |                      | 400.000.000     |  |
| 1    | 2  | 5  | 2.03 | 1  | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |  |  |                   |                | 27.500.000          | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |                |  |                |                      | 25.000.000      |  |
| 1    | 2  | 1  |      |    | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                | Kab Purwakarta   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 1 dokumen         |                | 27.500.000          | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                | Kab Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | 1 dokumen      |                      | 25.000.000      |  |
|      | 02 | 01 | 2.10 |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |  |                   |                |                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |                |  |                |                      |                 |  |
|      | 02 | 02 | 2.10 | 01 | Peningkatan Pelayanan BLUD  |  |  |                   |                | 253                 | Peningkatan Pelayanan BLUD  |                |  |                |                      | 35.215.811.765  |  |
|      |    |    |      | 1  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |  |  |                   |                | 253                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |  |                |                      | 35.215.811.765  |  |

| Kode | Rancangan Awal   |  |   |  |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                      |  |   |  |                      | Catatan Penting |  |
|------|--|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------|-----------------|--|
|      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |  |
| 1    | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                   | 12              |  |
|      | 2  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Purwakarta) | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih        | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 2   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Purwakarta) | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih        | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 1.646.663.275   |  |
|      | 3  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Munjuljaya) | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 3   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Munjuljaya) | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 1.332.629.550   |  |
|      | 4  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Maracang)   | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Maracang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 4   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Maracang)   | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Maracang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 892.110.750     |  |
|      | 5  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Mulyamekar) | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwareng, Cigelam              | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 6   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Mulyamekar) | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwareng, Cigelam              | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 986.522.700     |  |
|      | 6  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Jatiluhur)  | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                               | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 7   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Jatiluhur)  | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                               | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 1.871.139.000   |  |
|      | 7  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Campaka)    | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan                                 | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 8   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Campaka)    | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan                                 | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 1.578.429.450   |  |
|      | 8  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bungursari) | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan                              | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 9   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bungursari) | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan                              | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 971.356.500     |  |
|      | 9  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Cibatu)     | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan                                  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja        | 10  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Cibatu)     | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan                                  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja         | 1.347.796.900   |  |

| Kode |    |   |   | Rancangan Awal   |              |                   |   |   | Hasil Analisis Kebutuhan  |              |                   |                |                      | Catatan Penting |
|------|----|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|---|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|      |    |   |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan         | Lokasi       | Indikator Kinerja | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp)                           | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi       | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6            | 7                 | 8   | 9   | 10  | 11           | 12                |                |                      |                 |
|      | 10 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 11                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 1.782.702.950     |                |                      |                 |
|      | 11 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 12                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 1.185.745.300     |                |                      |                 |
|      | 12 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan    | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 13                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan    | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.247.989.238     |                |                      |                 |
|      | 13 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 14                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 1.139.012.200     |                |                      |                 |
|      | 14 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukatani)    | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan    | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 15                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukatani)    | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan    | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.833.355.626     |                |                      |                 |
|      | 15 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Darangdan)   | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 17                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Darangdan)   | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.741.378.626     |                |                      |                 |
|      | 16 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bojong)      | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 18                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bojong)      | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.109.206.700     |                |                      |                 |
|      | 17 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Plered)      | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 19                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Plered)      | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 3.632.292.500     |                |                      |                 |
|      | 18 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Tegalwaru)   | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 20                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Tegalwaru)   | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan   | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.843.652.700     |                |                      |                 |
|      | 19 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Maniis)      | Kab. Purwakarta, Maniis, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja | 21                | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Maniis)      | Kab. Purwakarta, Maniis, Semua Kelurahan      | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan  | 1 unit kerja | 2.127.046.300     |                |                      |                 |

| Kode |    |    |      | Rancangan Awal   |   |  |                |                       | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|----|----|------|--|---|--|----------------|-----------------------|---|---|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |    |    |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan                             | Lokasi  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    |    |    |      | 2  | 3   | 4  | 5              | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|      |    |    | 20   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukasari)                               | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan                                | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 22                    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukasari)                            | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan                                | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 922.162.500          |                 |
|      |    |    | 21   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Koncara)                                | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar             | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 23                    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Koncara)                             | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar             | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 859.244.000          |                 |
|      | 02 | 02 |      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Laboratorium Kesehatan)                           | Kab Purwakarta  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 0                     | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Laboratorium Kesehatan)                        | Kab Purwakarta  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 1 unit kerja   | 165.375.000          |                 |
|      | 02 | 02 | 2,02 | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>             |   |  |                | <b>311.072.580</b>    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          |   |  |                |                      |                 |
|      | 02 | 02 | 2,02 | 33 <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |  |                | <b>311.072.580</b>    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |  |                |                      |                 |
|      |    |    | 1    | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                | <b>57.918.378.189</b> | Operasional Pelayanan Puskesmas   |   |  |                | 20.500.726.000       |                 |
|      |    |    | 2    | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Purwakarta)                                    | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih        | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 2.444.628.375         | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Purwakarta)                                 | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih        | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 1.090.293.000        |                 |
|      |    |    | 3    | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Munjuljaya)                                    | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 1.869.410.025         | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Munjuljaya)                                 | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 1.036.535.000        |                 |
|      |    |    | 4    | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Maracang)                                      | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Maracang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 2.504.571.697         | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Maracang)                                   | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Maracang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | 1 tahun        | 975.551.000          |                 |

| Kode | Rancangan Awal   |  |  |  |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |  |  |                      | Catatan Penting |  |
|------|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|----------------------|-----------------|--|
|      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja  | Target Capaian                         | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Lokasi   | Indikator Kinerja  | Target Capaian                         | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |  |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                                      | 6                   | 7   | 8  | 9  | 10                                     | 11                   | 12              |  |
|      | 5  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mulyamekar)  | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwareng, Cigelam | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 1.792.641.848   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mulyamekar)  | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwareng, Cigelam | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 862.962.000     |  |
|      | 6  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Jatiluhur)   | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                  | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 1.965.422.340   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Jatiluhur)   | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                  | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.054.729.000   |  |
|      | 7  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Campaka)     | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 3.143.806.313   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Campaka)     | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.001.401.000   |  |
|      | 8  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bungursari)  | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan                 | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 3.016.530.405   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bungursari)  | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan                 | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.059.995.000   |  |
|      | 9  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Cibatu)      | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan                     | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 1.883.577.150   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Cibatu)      | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan                     | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.059.301.000   |  |
|      | 10   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan                  | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 2.708.862.345   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan                  | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.062.030.000   |  |
|      | 11   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan                | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 2.649.270.015   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan                | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 954.697.000     |  |
|      | 12   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 2.115.719.550   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.064.184.000   |  |
|      | 13   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan                 | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun             | 3.732.337.350   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan                 | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | 1 tahun              | 1.004.593.000   |  |

| Kode |    |      |    | Rancangan Awal  |   |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |  |                |                      | Catatan Penting |
|------|----|------|----|---|---|--|----------------|---------------------|---|---|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Lokasi  | Indikator Kinerja                            | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan               | Lokasi  | Indikator Kinerja                            | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    |    |      |    | 2   | 3   | 4  | 5              | 6                   | 7   | 8   | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|      |    |      | 14 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukatani)                     | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 2.051.659.890       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukatani)                     | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.118.852.000        |                 |
|      |    |      | 15 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Darangdan)                    | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 3.766.979.003       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Darangdan)                    | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.071.366.000        |                 |
|      |    |      | 16 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bojong)                       | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 4.383.203.738       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bojong)                       | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.008.631.000        |                 |
|      |    |      | 17 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Plered)                       | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 3.972.980.025       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Plered)                       | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.119.571.000        |                 |
|      |    |      | 18 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Tegalwaru)                    | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 4.737.819.555       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Tegalwaru)                    | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan                   | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.117.057.000        |                 |
|      |    |      | 19 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Maniis)                       | Kab. Purwakarta, Maniis, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 4.675.614.300       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Maniis)                       | Kab. Purwakarta, Maniis, Semua Kelurahan                      | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 978.978.000          |                 |
|      |    |      | 20 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukasari)                     | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 2.866.012.695       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukasari)                     | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan                    | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 878.013.000          |                 |
| 02   | 02 | 2,02 | 34 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Koncara)                      | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 1.637.331.570       | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Koncara)                      | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar | jumlah kebutuhan operasional puskesmas       | 1 tahun        | 981.987.000          |                 |
|      |    |      |    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                             |   |  |                | 1.775.192.580       | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                             |   |  |                | 1.300.000.000        |                 |
|      |    |      |    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Perbekalan Kesehatan) | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan             | terpenuhinya kebutuhan operasional kesehatan | 1 tahun        | 311.072.580         | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Perbekalan Kesehatan) | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan             | terpenuhinya kebutuhan operasional kesehatan | 1 tahun        | 300.000.000          |                 |

| Kode | Rancangan Awal  |   |   |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |   |                |                      | Catatan Penting |
|------|---|---|---|----------------|---------------------|---|---|---|----------------|----------------------|-----------------|
|      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Lokasi  | Indikator Kinerja                             | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan                 | Lokasi  | Indikator Kinerja                             | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5              | 6                   | 7   | 8   | 9   | 10             | 11                   | 12              |
|      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan) | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | terlaksananya kebutuhan operasional kesehatan | 1 tahun        | 1.464.120.000       | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan) | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | terlaksananya kebutuhan operasional kesehatan | 1 tahun        | 1.000.000.000        |                 |

Berdasarkan review terhadap rancangan awal dan analisis kebutuhan, maka belum semua kebutuhan dapat terpenuhi mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kegiatan. Selain itu adanya kegiatan baru yang belum masuk pada rancangan awal, disebabkan adanya prioritas dan kebijakan baru baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Hal ini juga masih kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan proses pembahasan KUA PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Purwakarta. Disisi lain keberhasilan dari capaian kegiatan dipengaruhi juga oleh peran serta masyarakat dan lintas sektor, dimana hal tersebut diluar kendali Dinas Kesehatan. Berbagai pengaruh dan faktor lainnya mempengaruhi juga terhadap belum terpenuhinya kebutuhan minimal pelayanan kesehatan. Sedangkan kesesuaian antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan menunjukkan adanya kesesuaian, hal ini karena telah memperhitungkan keterbatasan dan kemampuan permasalahan di atas. Namun untuk memecahkan seluruh permasalahan dan menjawab tantangan bidang kesehatan dimasa depan maka diperlukan analisis lebih lanjut dan dukungan dan advokasi yang kuat dengan stakeholder terkait.

Selain itu dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 dengan memperhatikan dan mengsinergikan dengan usulan internal Dinas Kesehatan. Adapun usulan dari luar Dinas Kesehatan antara lain aspirasi masyarakat dan pokok pikiran wakil rakyat DPRD Kabupaten Purwakarta. Adapun usulan tersebut sudah diakomodir pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

| No | Permasalahan                                | Usulan              | Pengusul                | Rekomendasi Kelurahan/Desa | Rekomendasi Kecamatan                 | Rekomendasi SKPD   |
|----|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | Banyaknya masyarakat yang terjangkit DBD    | Pelayanan Kesehatan | Kepala Desa Cibening    |                            | Sudah hasil dari Musrenbang Kecamatan | Sudah menjadi tugas kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan dikoordinasikan oleh UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan pada wilayahnya dan kepanjangan Dinas Kesehatan |
| 2  | Pelatihan Kader PKK dan Kader Posyandu Desa | Pelayanan Kesehatan | Kepala Desa Cinangka    |                            | Sudah hasil dari Musrenbang Kecamatan | Sudah menjadi tugas kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan dikoordinasikan oleh UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan pada wilayahnya dan kepanjangan Dinas Kesehatan |
| 3  | Penanganan Stunting                         | Pelayanan Kesehatan | Kepala Desa Sindanglaya |                            | Sudah hasil dari Musrenbang Kecamatan | Sudah menjadi tugas kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan dikoordinasikan oleh UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan pada wilayahnya dan kepanjangan Dinas Kesehatan |

| No | Permasalahan  | Usulan                             | Pengusul                                  | Rekomendasi Kelurahan/Desa | Rekomendasi Kecamatan                              | Rekomendasi SKPD   |
|----|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| 4  | Kurangnya kesadaran pola hidup sehat dan bersih     | Pelayanan Kesehatan                | Kepala Desa Ciawi                         |                            | Sesuai kesepakatan hasil dari Musrenbang Kecamatan | Sudah menjadi tugas kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan dikoordinasikan oleh UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan pada wilayahnya dan kepanjangan Dinas Kesehatan |
| 5  | Kurangnya pemahaman dan wawasan kader               | Pelayanan Kesehatan                | Kepala Desa Sukahaji                      |                            | Sesuai kesepakatan hasil dari Musrenbang Kecamatan | Sudah menjadi tugas kewenangan Dinas Kesehatan dengan pelaksanaan dikoordinasikan oleh UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan pada wilayahnya dan kepanjangan Dinas Kesehatan |
| 6  | Bantuan Peralatan Unit Donor Darah (UDD) Tahun 2023 | HB Operasional Pelayanan Kesehatan | Unit Donor Darah PMI Kabupaten Purwakarta |                            |  | Dikoordinasikan dengan TAPD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Purwakarta   |

Dengan memperhatikan berbagai usulan yang dikumpulkan baik dari masyarakat maupun pemangku kebijakan dari berbagai stakeholder termasuk puskesmas dan UPTD lainnya serta aspirasi masyarakat melalui kunjungan lapangan, forum musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, maupun usulan Bidang teknis maka hasil-hasil tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Dalam penyerapan aspirasi maka Dinas Kesehatan membentuk dan menyebarkan tim pemantau untuk mengikuti jalannya musrenbang. Hasil musrenbang tersebut digunakan untuk menyusun Rancangan Renja Dinas Kesehatan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam forum SKPD lintas sektor termasuk usulan musrenbang, usulan Dinas kesehatan yang meliputi usulan program dan kegiatan dari puskesmas dan pengelola program di Dinkes. Hal ini menjadi masukan dalam penyesuaian rancangan Renja SKPD dan penyusunan rancangan awal RKPD oleh Bappelitbangda yang selanjutnya menjadi acuan penetapan program dan kegiatan dalam menyusun Renja SKPD. Musrenbang kabupaten dilanjutkan dengan Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional. Dinas Kesehatan melakukan kajian informasi berbagai usulan tersebut. Usulan kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan terkait dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan kewenangan Dinas kesehatan.

Yang menjadi pertimbangan penentuan program, kegiatan maupun anggaran diantaranya adalah :

- a. program/kegiatan yang lanjutan;
- b. program/kegiatan yang menyokong kebijakan nasional dan provinsi;
- c. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
- d. program/kegiatan prioritas hasil analisis kebutuhan.

## BAB

# TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya

di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya

Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah:

- a. pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- b. pemberdayaan masyarakat dan daerah;
- c. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
- d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-204, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Tabel 3.1  
Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024  
yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan

| No | Indikator   | Status awal                    | Target 2024 |
|----|---|--------------------------------|-------------|
| 1  | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                      | 305<br>(SUPAS 2015)            | 183         |
| 2  | Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)                        | 24<br>(SDKI 2017)              | 16          |
| 3  | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 27,7<br>(SSGBI 2019)           | 14%         |
| 4  | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)    | 10,2<br>(Riskesdas 2018)       | 7           |
| 5  | Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)           | 0,24<br>(Kemkes, 2018)         | 0,18        |
| 6  | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                         | 319<br>(Global TB Report 2017) | 190         |

|    |   |                          |      |
|----|---|--------------------------|------|
| 7  | Eliminasi malaria (kabupaten/kota)                                    | 285<br>(Kemkes, 2018)    | 405  |
| 8  | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)                      | 9,1<br>(Riskesdas 2018)  | 8,7  |
| 9  | Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)                  | 21,8<br>(Riskesdas 2018) | 21,8 |
| 10 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)     | 57,9<br>(Riskesdas 2018) | 90   |
| 11 | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)      | 40<br>(Kemkes, 2018)     | 100  |
| 12 | Persentase rumah sakit terakreditasi                                  | 63<br>(Kemkes, 2018)     | 100  |
| 13 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 23<br>(Kemkes, 2018)     | 83   |
| 14 | Persentase puskesmas tanpa dokter (%)                                 | 12<br>(Kemkes, 2019)     | 0    |
| 15 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)            | 86<br>(Kemkes, 2018)     | 96   |

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;

pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan**

#### **3.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis dan mengacu pada arah pembangunan tahap ke 4 pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005 –2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Visi

#### **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun penjelasan dari Visi ini adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia dimuka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

### 3.2.2 Tujuan

Pada dasarnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dimana meningkatnya kemampuan masyarakat sehingga mampu mengenali permasalahan kesehatan dan mengatasi permasalahan kesehatan sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkarakter.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana Pasal 13 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Visi</b>    | : | <b>Mewujudkan Purwakarta Istimewa</b>                                       |
| <b>Misi I</b>  | : | <b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</b> |
| Tujuan 1       | : | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya    |
| Sasaran 1.3    | : | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                   |
| Strategi 1.3.1 | : | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan                         |

Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta.

### 3.2.3 Sasaran

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Visi</b>    | : | <b>Mewujudkan Purwakarta Istimewa</b>                                       |
| <b>Misi I</b>  | : | <b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</b> |
| Tujuan 1       | : | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya    |
| Sasaran 1.3    | : | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                   |
| Strategi 1.3.1 | : | Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan                         |

Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka strategi yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, maka falsafah dan motto yang ingin dibangun adalah :

**Waluya Jatining Hurip (Kesehatan adalah esensi Kehidupan)**

**Sehat Bersama kami, sejahtera bersama keluarga**

Sasaran yang menjadi tujuan pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sesuai yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun 2023. Sedangkan sasaran yang menjadi sasaran strategis pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 adalah

“Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan indikator yang ingin dicapai yaitu menurunnya persentase kematian ibu dan bayi menjadi 0,09% untuk kematian ibu atau 90 perseratus ribu kelahiran hidup tahun 2023 dan 0,41% untuk kematian bayi 4 perseribu kelahiran hidup.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka dijabarkan secara lebih detail pada indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2018- 2021**

| NO | TUJUAN                                    | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN | Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke- |                        |                        |                        |                   |                   |                   |
|----|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |   |                                   | TAHUN 2017 (Realisasi)                        | TAHUN 2018 (Realisasi) | TAHUN 2019 (Realisasi) | TAHUN 2020 (Realisasi) | TARGET TAHUN 2021 | TARGET TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 |
| 1  | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas | <b>Umur Harapan Hidup</b>         | 70,42   | 70,54                  | 70.71                  | 70.99                  | 70.98             | 71.11             | 71.24             |
|    |   |   | Persentase kematian ibu           | 0.11%   | 0.13%                  | 0,14%                  | 0.19%                  | 0.12%             | 0.11%             | 0.09%             |
|    |   |   | Persentase kematian bayi          | 0.53%   | 0.49%                  | 0,41%                  | 0.21%                  | 0.46%             | 0.44%             | 0.41%             |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2021 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Tingkat Nasional. Rencana kerja yang dibuat mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 serta

sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumberdaya yang ada.

Pada tahun 2021 mengalami perubahan terkait nomenklatur program dan kegiatan serta adanya menu sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) serta KepMendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan dengan KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

| KODE   |               |         |          |              | NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN   | PENANGGUNG JAWAB |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |  |                  |
| X      |               |         |          |              |  |                  |
| X      | XX            |         |          |              |  |                  |
| X      | XX            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |                  |

|   |    |    |      |    |  |                       |
|---|----|----|------|----|--|-----------------------|
| X | XX | 01 | 2,01 |    | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah Perangkat                          |                       |
| X | XX | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah                              | Sub substansi PI      |
| X | XX | 01 | 2,01 | 02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Sub substansi PI      |
| X | XX | 01 | 2,01 | 03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah                               | Sub substansi PI      |
| X | XX | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah                   | Sub substansi PI      |
| X | XX | 01 | 2,01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Sub substansi PI      |
| X | XX | 01 | 2,02 |    | Administrasi Keuangan  |                       |
| X | XX | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi                                     | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                      | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Sub Bagian PI/<br>KAA |
| X | XX | 01 | 2,02 | 07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran                             | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                          | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,02 | 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                  | Sub Bagian KAA        |
| X | XX | 01 | 2,03 |    | Administrasi Umum  |                       |
| X | XX | 01 | 2,03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns                         | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional     | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                      | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Sub Bagian KUH        |
| X | XX | 01 | 2,03 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan  | Sub Bagian KUH        |

|   |    |    |      |    |  |                |
|---|----|----|------|----|--|----------------|
|   |    |    |      |    | Kerja  |                |
| X | XX | 01 | 2,03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan                           | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 19 | Pengadaan Mobil Jabatan  | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                       | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                          | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 25 | Pengadaan Mebeleur   | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                         | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                           | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                         | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas      | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas         | Sub Bagian KUH |
| X | XX | 01 | 2,03 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor               | Sub Bagian KUH |

|   |    |    |      |    |   |                    |
|---|----|----|------|----|---|--------------------|
| X | XX | 01 | 2,03 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,03 | 36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,03 | 37 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,03 | 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,03 | 39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,03 | 40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional                                       | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 |    | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     |                    |
| X | XX | 01 | 2,04 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 04 | Pengadaan Pakaian Korpri  | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 07 | Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas                                      | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 08 | Pemindahan Tugas PNS  | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | Sub Bagian KUH     |
| X | XX | 01 | 2,04 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                  | Sub Bagian KUH     |
|   |    |    |      |    |   |                    |
| 1 |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                    |
| 1 | 02 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |                    |
| 1 | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |                    |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota |                    |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           | Sub substansi SPAK |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 02 | Pembangunan Puskesmas   | Sub substansi SDM  |

|   |    |    |      |    |  |                            |
|---|----|----|------|----|--|----------------------------|
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan   | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 05 | Pengembangan Rumah Sakit   | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 06 | Pengembangan Puskesmas   | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  | Sub substansi SDM          |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                       | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin   | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                               | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Sub substansi SPAK         |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             |                            |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Sub substansi Kesga & Gizi |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Sub substansi Kesga & Gizi |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Sub substansi Kesga & Gizi |

|   |    |    |      |    |   |  |
|---|----|----|------|----|---|--|
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Sub substansi Kesga & Gizi               |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | Sub substansi Kesga & Gizi               |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Sub substansi Kesga & Gizi               |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Sub substansi Kesga & Gizi               |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Sub substansi P2 PTM                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Sub substansi P2 PTM                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat  | Sub substansi P2 PTM                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Sub substansi P2 PM                      |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Sub substansi P2 PM                      |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Sub substansi SI                         |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Sub substansi SI                         |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Sub substansi Kesga dan Gizi             |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Sub substansi KLKKOR                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Sub substansi KLKKOR                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Sub substansi PK & PM                    |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                      | Sub substansi PKPKT                      |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Sub substansi SI                         |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | Sub substansi P2 PTM                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | Sub substansi P2 PTM                     |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Sub substansi SI/<br>Sub substansi PKPKT |

|   |    |    |      |    |  |                                    |
|---|----|----|------|----|--|------------------------------------|
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                         | Sub substansi SI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Sub substansi P2PM/ PTM            |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Sub substansi JPK                  |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah   | Sub substansi Faralkes             |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                       | Sub substansi SI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | Sub substansi PKPM                 |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Sub substansi PKR &JPK             |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 31 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan   | Sub Substansi PI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | Sub substansi PKR                  |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Sub substansi PKPKT/ UPT Puskesmas |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | UPT Labkes/ Perbekes               |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota   | Sub substansi MPK                  |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    | Sub substansi SI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | Sub substansi SI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi   |                                    |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | Sub substansi PI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | Sub substansi PI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,03 | 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                | Sub substansi PI                   |
| 1 | 02 | 02 | 2,04 |    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota |                                    |
| 1 | 02 | 02 | 2,04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D           | Sub substansi PKR                  |

|   |    |    |      |    |  |                        |
|---|----|----|------|----|--|------------------------|
| 1 | 02 | 02 | 2,04 | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                     | Sub substansi PKR      |
| 1 | 02 | 02 | 2,04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | Sub substansi MPK      |
| 1 | 02 | 02 | 2,04 | 04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan  | Sub substansi PKR &JPK |
|   |    |    |      |    |  |                        |
| 1 | 02 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   |                        |
| 1 | 02 | 03 | 2,01 |    | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota   |                        |
| 1 | 02 | 03 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                       | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,02 |    | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  |                        |
| 1 | 02 | 03 | 2,02 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,02 | 02 | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan  | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,02 | 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,03 |    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota |                        |
| 1 | 02 | 03 | 2,03 | 01 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,03 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar   | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,04 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota         |                        |
| 1 | 02 | 03 | 2,04 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Sub substansi SDM      |
| 1 | 02 | 03 | 2,04 | 02 | Sertifikasi Tenaga Kesehatan   | Sub substansi SDM      |

|   |    |    |      |    |   |                    |
|---|----|----|------|----|---|--------------------|
| 1 | 02 | 03 | 2,05 |    | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                    |
| 1 | 02 | 03 | 2,05 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Sub substansi SDM  |
| 1 | 02 | 03 | 2,05 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Sub substansi SDM  |
|   |    |    |      |    |   |                    |
| 1 | 02 | 04 |      |    | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>  |                    |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 |    | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |                    |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)        | Sub substansi Farm |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Sub substansi Farm |
| 1 | 02 | 04 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Sub substansi Farm |
| 1 | 02 | 04 | 2,02 |    | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga  |                    |
| 1 | 02 | 04 | 2,02 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga    | Sub substansi Farm |
| 1 | 02 | 04 | 2,02 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                               | Sub substansi Farm |

|   |    |    |      |    |   |  |
|---|----|----|------|----|---|--|
| 1 | 02 | 04 | 2,03 |    | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   |  |
| 1 | 02 | 04 | 2,03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Sub substansi Farm                       |
| 1 | 02 | 04 | 2,04 |    | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  |  |
| 1 | 02 | 04 | 2,04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)                            | Sub substansi Farm/ Sub substansi KLKKOR |
| 1 | 02 | 04 | 2,05 |    | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   |  |
| 1 | 02 | 04 | 2,05 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Sub substansi Farm/ Sub substansi KLKKOR |
| 1 | 02 | 04 | 2,06 |    | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  |  |
| 1 | 02 | 04 | 2,06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan   | Sub substansi Farm                       |
| 1 | 02 | 04 | 2,06 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga  | Sub substansi Farm                       |
| 1 | 02 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   |  |

|   |    |    |      |    |  |                    |
|---|----|----|------|----|--|--------------------|
| 1 | 02 | 05 | 2,01 |    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |                    |
| 1 | 02 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                   | Sub substansi PKPM |
| 1 | 02 | 05 | 2,02 |    | Pelaksanaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota              |                    |
| 1 | 02 | 05 | 2,02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Sub substansi PKPM |
| 1 | 02 | 05 | 2,03 |    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            |                    |
| 1 | 02 | 05 | 2,03 | 01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)           | Sub substansi PKPM |

**BAB**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KESEHATAN**



Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2023 dituangkan dalam Bab IV ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program serta kegiatan Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab III dan IV ini adalah mengacu kepada : (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta (iii) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab IV ini adalah hanya memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 15 (Lima Belas) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Perhubungan;
9. Komunikasi dan Informatika;
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Penanaman Modal;
12. Kepemudaan dan Olahraga;
13. Kebudayaan;
14. Perpustakaan;
15. Kearsipan.

Urusan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;

6. Transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan;
2. Pengawasan;
3. Perencanaan;
4. Keuangan; dan
5. Kepegawaian.

Berdasarkan uraian diatas maka kesehatan merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan.

Dengan memperhatikan hal diatas dan mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2018-2023 seperti pada tabel 4.1 dan 4.2 dibawah ini.

**TABEL 4.1**  
**INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET KINERJA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2021, 2022, dan 2023**

| NO  | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>PROGRAM                                       | INDIKATOR<br>KINERJA<br>TUJUAN/<br>SASARAN/<br>PROGRAM | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL<br>DAN CAPAIAN TAHUN 0 S/D<br>TAHUN KE-2 PERIODE<br>RPJMD(PERUBAHAN RPJMD NO<br>3 TAHUN 2021) |       |       |       | TARGET CAPAIAN<br>SETIAP TAHUN |       |       |
|-----|--|--|--------|---|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|
|     |  |  |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                           | 2022  | 2023  |
| A.  | Tujuan   |  |        |   |       |       |       |                                |       |       |
| 1   | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                            | <b>Umur Harapan Hidup</b>                              | Ind ex | 70,43   | 70,55 | 70.71 | 70.85 | 70.98                          | 71.11 | 71.24 |
| B.  | Sasaran  |  |        |   |       |       |       |                                |       |       |
|     | Meningkatnya aksebilas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas      | Persentase kematian ibu                                | %      | 0.11  | 0.17  | 0.15  | 0.13  | 0.12                           | 0.11  | 0.09  |
|     |  | Persentase kematian bayi                               | %      | 0.53  | 0.29  | 0.50  | 0.49  | 0.46                           | 0.44  | 0.41  |
| C.  | Program (PerMendagri Nomor 90/2019)/ KepMendagri Nomor 050-3708/2020 |  |        |   |       |       |       |                                |       |       |
| 1.1 | Program Penunjang Urusan   | Capaian SAKIP Perangkat                                | opini  | B   | B     | BB    | BB    | BB                             | BB    | BB    |

|     |   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | Pemerintahan Daerah   | Daerah   |   |       |       |       |       |       |       |       |
|     |   | Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran                         | % | 65    | 68    | 70    | 70    | 75    | 80    | 85    |
| 2.1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan                                       | % | 65    | 68    | 70    | 73    | 75    | 75    | 80    |
|     |   | Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial                        | % | 85    | 88    | 90    | 90    | 90    | 95    | 95    |
| 2.2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar (minimal 9 jenis tenaga kesehatan) | % | 81    | 83    | 85    | 88    | 90    | 95    | 100   |
| 2.3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Cakupan sarana farmasi yang dibina   | % | 78    | 81    | 86    | 88    | 92,21 | 94,81 | 100   |
| 2.4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri                                  | % | 60,94 | 61,63 | 62,02 | 62,71 | 63,30 | 63,89 | 65,16 |

Selanjutnya dalam mendukung capaian kinerja kinerja SKPD Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD, maka disusunlah indikator kinerja turunan yang akan dicapai oleh perangkat organisasi Dinas Kesehatan, meliputi bidang/sekretariat, seksi/ sub bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan. Indikator kinerja bidang/sekretariat, seksi/sub bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan ditampilkan dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**INDIKATOR KINERJA BIDANG/SEKRETARIAT, SEKSI/SUB**  
**BAGIAN DAN UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**TAHUN 2018-2023**

| No                                   | Jenis Pelayanan | Indikator Kinerja |   | Satuan | Realisasi dan Target Kinerja Renstra |        |        |        |      |      |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                      |                 |                   |   |        | Realisasi                            |        |        | Target |      |      |
|                                      |                 |                   |   |        | 2018                                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |
| KINERJA BIDANG/SEKRT,UPTD            |                 |                   |   |        |                                      |        |        |        |      |      |
| A. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT       |                 |                   |   |        |                                      |        |        |        |      |      |
| 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi |                 |                   |   |        |                                      |        |        |        |      |      |
| 1                                    | Kesehatan Ibu   | 1                 | Cakupan pelayanan ibu hamil   | %      | 97,74                                | 100,49 | 99,41  | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 2                 | Cakupan Linfaskes   | %      | 89,38                                | 92,78  | 92,87  | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 3                 | Cakupan Linakes   | %      | 98,66                                | 101    | 101,2  | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 4                 | Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan   | %      | 68,88                                | 156,57 | 136,48 | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 5                 | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas   | %      | 99,31                                | 102,3  | 101,4  | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 6                 | Cakupan peserta KB aktif  | %      | 71,48                                | 80,3   | 85,8   | 85     | 90   | 95   |
|                                      |                 | 7                 | Cakupan peserta KB pasca persalinan   | %      |                                      | 77,6   | 92,7   | 95     | 98   | 100  |
|                                      |                 | 8                 | Cakupan Puskesmas melaksanakan kegiatan Deteksi Dini IVA (Inspeksi Visual dengan Asam asetat) & SADANIS(Pemeriksaan payudara secara klinis) | %      | 100                                  | 100    | 100    | 100    | 100  | 100  |
| 2                                    | Kesehatan Bayi  | 9                 | Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir   | %      | 84,91                                | 99,94  | 90,57  | 100    | 100  | 100  |
|                                      |                 | 10                | Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)  | %      | 97,28                                | 98,5   | 107,1  | 100    | 100  | 100  |

|   |                           |    |   |    |       |       |       |     |     |     |
|---|---------------------------|----|---|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |                           | 11 | Cakupan Penanganan komplikasi Neonatal  | %  | 72,73 | 82,1  | 76,5  | 100 | 100 | 100 |
|   |                           | 12 | Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi   | %  | 57,23 | 56,6  | 62,2  | 63  | 64  | 65  |
| 3 | Pelayanan Gizi Masyarakat |    | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita  | 48 | 71    | 62,5  | 65    | 70  | 75  | 80  |
|   |                           | 13 | Cakupan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dibawah 5%   | %  | 1,94  | 2,4   | 2,3   | <5  | <5  | <5  |
|   |                           | 14 | Cakupan Balita ditimbang (D/S)  | %  | 88,67 | 88,1  | 58,1  | 85  | 90  | 95  |
|   |                           | 15 | Cakupan Balita gizi kurang (BB/umur)  | %  | 0,97  | 3,5   | 3,7   | <5  | <5  | <5  |
|   |                           | 16 | Cakupan Balita pendek dan sangat pendek/ stunting (TB/umur)   | %  |       | 3,3   | 3,3   | <5  | <5  | <5  |
|   |                           | 17 | Cakupan Balita kurus dan sangat kurus/wasting (BB/TB)   | %  |       | 0,9   | 0,9   | <5  | <5  | <5  |
|   |                           | 18 | Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi   | %  | 98,27 | 99,08 | 99,45 | 100 | 100 | 100 |
|   |                           | 19 | Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita   | %  | 96,79 | 98,37 | 97,99 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Kesehatan Anak dan Remaja | 20 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (anak kelas 1 s/d 9 di sekolah dan usia 7-15 tahun diluar sekolah) | %  |       |       | 42,5  | 100 | 100 | 100 |
|   |                           | 21 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI   | %  | 100   | 99,83 | 98,9  | 100 | 100 | 100 |
|   |                           | 22 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs   | %  |       | 100,0 | 98,0  | 100 | 100 | 100 |

|   |                      |    |  |   |       |       |       |     |     |     |
|---|----------------------|----|--|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |                      | 23 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA  | % |       | 99,0  | 97,8  | 100 | 100 | 100 |
|   |                      | 24 | Cakupan puskesmas PKPR   | % | 25    | 25    | 40    | 40  | 45  | 50  |
|   |                      | 25 | Penerapan model sekolah sehat  | % | 4,9   | 4,9   | 4,9   | 20  | 20  | 20  |
| 5   | Kesehatan Lansia     | 26 | Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia  | % | 42    | 45,8  | 48,19 | 50  | 60  | 70  |
|   |                      | 27 | Cakupan puskesmas santun lansia  | % | 25    | 25    | 40    | 40  | 45  | 50  |
| 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga |                      |    |  |   |       |       |       |     |     |     |
| 1   | Kesehatan Lingkungan | 28 | Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)                            | % | 77,68 | 78,1  | 94,1  | 95  | 95  | 95  |
|   |                      | 29 | Cakupan sarana air minum yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)                  | % | 26,25 | 51,50 | 44,65 | 50  | 55  | 60  |
|   |                      | 30 | Cakupan Desa yang melaksanakan STBM  | % | 76,56 | 83,9  | 88,5  | 90  | 93  | 95  |
|   |                      | 31 | Cakupan Desa yang mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ Open Defecation Free(ODF) | % | 18,23 | 25,5  | 30,7  | 35  | 40  | 45  |
|   |                      | 32 | Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat fasilitas Umum (TFU)            | % | 74,86 | 77,9  | 58,8  | 60  | 65  | 70  |
|   |                      | 33 | Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat Pengelolaan Pangan(TPP)         | % | 39,79 | 38,6  | 44,2  | 45  | 48  | 50  |

|  |  |    |   |   |              |              |              |             |              |              |
|--|--|----|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 2  | Kesehatan Kerja                          | 34 | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja       | % | 100          | 100          | 100          | 100         | 100          | 100          |
| 3  | Kesehatan Olahraga                       | 35 | Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga    | % | 100          | 100          | 100          | 100         | 100          | 100          |
| 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |    |   |   |              |              |              |             |              |              |
| 1  | Promosi dan Pengembangan Media Kesehatan | 36 | Cakupan puskesmas memiliki paket media kampanye kesehatan | % | 100          | 100          | 100          | 100         | 100          | 100          |
| 2  | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 37 | Cakupan rumah tangga ber PHBS                             | % | 66,07        | 62,8         | 65,99        | 65,9        | 66,0         | 66,1         |
| 3  | Pemberdayaan Masyarakat                  | 38 | <b>Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri</b>            | % | <b>61,63</b> | <b>62,02</b> | <b>62,71</b> | <b>63,3</b> | <b>63,89</b> | <b>65,16</b> |
|  |  | 39 | Rasio posyandu per desa                                   | % | 5,4          | 5,4          | 5,4          | ≥5          | ≥5           | ≥5           |
|  |  | 40 | Rasio posyandu per 100 balita                             | % | 1,16         | 1,2          | 1,2          | 1           | 1            | 1            |
|  |  | 41 | Persentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri                 | % | 4,2          | 13,5         | 29,7         | 30          | 33           | 35           |
| B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT         |  |    |   |   |              |              |              |             |              |              |
| 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi                      |  |    |   |   |              |              |              |             |              |              |
| 1  | Surveilans Epidemiologi                  | 42 | Kelengkapan laporan dan ketepatan sistem kewaspadaan dini | % | 100          | 100          | 100          | 100         | 100          | 100          |
|  |  | 43 | Persentase KLB yang ditangani < 24 jam                    | % | 100          | 100          | 100          | 100         | 100          | 100          |
| 2  | Imunisasi                                | 44 | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap                           | % | 92,40        | 95,7         | 90,0         | 85          | 90           | 95           |
|  |  | 45 | Cakupan desa UCI  | % | 98,96        | 99,5         | 80,2         | 85          | 90           | 95           |

|   |                                  |    |   |   |       |       |       |     |     |     |
|---|----------------------------------|----|---|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|   |                                  | 46 | Cakupan Imunisasi campak/MR BIAS  | % | 89,99 | 93,22 | 88,12 | 75  | 85  | 90  |
|   |                                  | 47 | Cakupan Imunisasi DT-TD BIAS  | % | 88,2  | 93,69 | 75,95 | 75  | 80  | 85  |
|   |                                  | 48 | Cakupan Imunisasi Td2+ pada ibu hamil   | % | 80,79 | 82,3  | 76,0  | 80  | 83  | 85  |
|   |                                  | 49 | Cakupan Imunisasi Covid-19  | % |       |       |       | 70  | 70  | 70  |
| 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |                                  |    |   |   |       |       |       |     |     |     |
| 1   | P2 Tuberculosis                  | 50 | Cakupan pelayanan dengan orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 93,57 | 89    | 65,9  | 100 | 100 | 100 |
|   |                                  | 51 | Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis                                | % | 76,18 | 90,6  | 90,9  | 92  | 93  | 95  |
|   |                                  | 52 | Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru terkonfirmasi Bakteriologis                              | % | 71,32 | 63,8  | 64,9  | 70  | 75  | 80  |
| 2   | Pengendalian Penyakit Filariasis | 53 | Persentase penderita filariasis yang ditemukan dan ditangani  | % | 100   | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 |
| 3   | Pengendalian Penyakit Pneumoni   | 54 | Persentase penderita pneumoni yang ditemukan dan ditangani  | % | 96,84 | 100,0 | 107,1 | 100 | 100 | 100 |
| 4   | Pengendalian Penyakit Diare      | 55 | Persentase penderita Diare ditemukan dan ditangani pada balita  | % |       | 102,0 | 70,0  | 100 | 100 | 100 |
| 5   | Pengendalian Penyakit DBD        | 56 | Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani   | % | 100   | 100   | 100   | 100 | 100 | 100 |

|   |  |    |   |      |       |       |       |      |      |      |
|---|--|----|---|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 6   | Pengen<br>dalian<br>Penyaki<br>t Kusta                                     | 57 | Cakupan<br>Penderita Kusta<br>PB Selesai<br>Berobat (RFT<br>PB)                                 | %    | 93,3  | 100   | 83,33 | 90   | 95   | 100  |
|   |  | 58 | Cakupan<br>Penderita Kusta<br>MB Selesai<br>Berobat (RFT<br>MB)                                 | %    | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |
| 7   | P2<br>HIV/AI<br>DS   | 59 | Cakupan<br>pelayanan<br>Kesehatan<br>Orang dengan<br>risiko terinfeksi<br>HIV sesuai<br>standa  | %    | 83,30 | 49    | 63,5  | 65   | 70   | 75   |
| 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular   |  |    |   |      |       |       |       |      |      |      |
| 1   | Kesehat<br>an<br>Indera  | 60 | Cakupan deteksi<br>dini gangguan<br>indera  | %    |       | 14,37 | 38,37 | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Kesehat<br>an Jiwa   | 61 | Cakupan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Orang dengan<br>Gangguan Jiwa<br>(Berat) sesuai<br>standar | %    | 16,47 | 28,95 | 100   | 100  | 100  | 100  |
| 3   | Pelayan<br>an<br>Kesehat<br>an pada<br>usia<br>produkt<br>if               | 62 | Cakupan Pelayan<br>an Kesehatan<br>pada Usia<br>Produktif sesuai<br>standar                     | %    | 22,89 | 26,34 | 26,27 | 100  | 100  | 100  |
| 5   | Pelayan<br>an<br>Kesehat<br>an<br>Penderi<br>ta<br>Hiperte<br>nsi          | 63 | Cakupan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penderita<br>Hipertensi<br>sesuai standar                  | %    | 1,86  | 14,61 | 22,03 | 100  | 100  | 100  |
| 6   | Pelayan<br>an<br>Kesehat<br>an<br>Penderi<br>ta<br>Diabete<br>s<br>Melitus | 64 | Cakupan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penderita<br>Diabetes Melitus<br>sesuai standar            | %    | 59,66 | 89,68 | 100   | 100  | 100  | 100  |
|   | Pelayan<br>an<br>Posbind<br>u  | 65 | Cakupan<br>Posbindu (PTM)   | buah | 237   | 239   | 192   | 192  | 192  | 192  |
| C. Bidang Pelayanan Kesehatan                                 |  |    |   |      |       |       |       |      |      |      |
| 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional |  |    |   |      |       |       |       |      |      |      |

|   |  |    |   |   |       |       |      |      |      |      |
|---|--|----|---|---|-------|-------|------|------|------|------|
| 1   | Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap                 | 66 | Cakupan kunjungan rawat jalan (kunjungan baru) di Puskesmas | % | 34,73 | 36,57 | 23,7 | 38   | 40   | 42   |
|   |  | 67 | Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas                   | % |       | 4.3   | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 5.5  |
| 2   | Pelayanan Kesehatan Tradisional                      | 68 | Cakupan pembinaan penyehat tradisional terdaftar            | % |       | 65.0  | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 65.5 |
| 3   | Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) | 69 | Cakupan Kunjungan Perkesmas                                 | % |       | 80.0  | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 4   | PIS PK   | 70 | Indek Keluarga Sehat  | % |       | 80.0  | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 5   | Pembinaan Yankes                                     | 71 | Puskesmas yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan      | % | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan |  |    |   |   |       |       |      |      |      |      |
| 1   | Pelayanan Kesehatan Rujukan                          | 72 | Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk            | % | 1,21  | 1,29  | 1,37 | 1,5  | 1,65 | 1,8  |
|   |  | 73 | Persentase Rumah sakit yang dibina                          | % | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2   | Jaminan dan pembiayaan kesehatan                     | 74 | Cakupan masyarakat miskin yang memiliki kartu JKN           | % | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|   |  | 75 | Cakupan kepesertaan JKN menuju UHC min 95%                  | % | 81,24 | 77,6  | 88,8 | 90   | 92   | 95   |
|   |  | 76 | Cakupan Rumah sakit bekerja sama dalam jaminan kesehatan    | % | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan                                     |  |    |   |   |       |       |      |      |      |      |

|                                 |                               |           |   |   |           |           |           |              |              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1                               | Mutu Pelayanan Kesehatan FKTP | 77        | Persentase puskesmas yang terakreditasi               | % | 100       | 100       | 100       | 100          | 100          | 100        |
|                                 |                               | 78        | Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya | % | 75        | 65        | 65        | 60           | 70           | 60         |
|                                 |                               | 79        | Persentase puskesmas yang terakreditasi utama         | % | 5         | 25        | 25        | 25           | 25           | 30         |
|                                 |                               | 80        | Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna     | % | 0         | 0         | 0         | 0            | 5            | 10         |
|                                 |                               | 81        | Persentase klinik yang terakreditasi                  | % | 0         | 2         | 2         | 10           | 15           | 25         |
|                                 |                               | 82        | Persentase klinik yang terakreditasi minimal madya    | % | 0         | 0         | 0         | 0            | 0            | 0          |
|                                 |                               | 83        | Persentase klinik yang terakreditasi utama            | % | 0         | 1         | 1         | 6            | 8            | 15         |
|                                 |                               | 84        | % Puskesmas hasil PKP yang mencapai strata baik       | % | 0         | 1         | 1         | 4            | 7            | 10         |
| 2                               | Mutu Pelayanan Kesehatan FKTR | 85        | Persentase rumah sakit yang terakreditasi             | % | 70        | 100       | 100       | 100          | 100          | 100        |
|                                 |                               | 86        | Persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna   | % | 20        | 30        | 30        | 30           | 40           | 50         |
| D. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN |                               |           |   |   |           |           |           |              |              |            |
| 1) Seksi Kefarmasian            |                               |           |   |   |           |           |           |              |              |            |
| 1                               | Pengawasan kefarmasian        | 87        | Cakupan Monitoring obat di puskesmas                  | % | 100       | 100       | 100       | 100          | 100          | 100        |
|                                 |                               | 88        | Cakupan sarana Apotek yang dibina                     | % | 100       | 87,5      | 77        | 100          | 100          | 100        |
|                                 |                               | 89        | Cakupan sarana Toko Obat yang dibina                  | % | 100       | 100       | 59        | 100          | 100          | 100        |
|                                 |                               | <b>90</b> | <b>Cakupan sarana farmasi yang dibina</b>             | % | <b>81</b> | <b>86</b> | <b>88</b> | <b>92,21</b> | <b>94,81</b> | <b>100</b> |
| 3                               | Pengawasan Makanan            | 91        | Cakupan sarana distribusi makanan dan minuman yang    | % |           | 70        | 29        | 80           | 85           | 90         |

|  |   |    |  |   |           |           |           |           |           |            |
|--|---|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  |   |    | dibina   |   |           |           |           |           |           |            |
|  |   | 92 | Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang memiliki SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan) | % | 47        | 149       | 124       | 120       | 130       | 140        |
|  |   | 93 | Jumlah Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang telah memiliki Sertifikat   | % | 2         | 2         | 2         | 23        | 25        | 27         |
|  |   | 94 | Jumlah Tenaga Pengawas Makanan (District Food Inspector/DFI) yang telah memiliki Sertifikat                                | % | 2         | 2         | 3         | 13        | 15        | 17         |
| 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan       |   |    |  |   |           |           |           |           |           |            |
| 1  | Pengembangan SDM kesehatan                                | 95 | <b>Pemenuhan tenaga kesehatan (minimal 9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar</b>  | % | <b>83</b> | <b>85</b> | <b>88</b> | <b>90</b> | <b>95</b> | <b>100</b> |
|  |   | 96 | Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi  | % | 63,25     | 64,73     | 67,32     | 70        | 75        | 80         |
| 3) Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan |   |    |  |   |           |           |           |           |           |            |
| 1  | Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 97 | Cakupan gedung UPTD Puskesmas dan UPTD lainnya sesuai standar  | % |           | 84.6      | 88.5      | 92.3      | 100.0     | 100.0      |
|  |   | 98 | Kelengkapan ASPAK Puskesmas yang tervalidasi Dinas Kesehatan   | % |           | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0      |
| E. SEKRETARIAT                               |   |    |  |   |           |           |           |           |           |            |
| 1) Sub Bagian Program dan Informasi          |   |    |  |   |           |           |           |           |           |            |

|  |                                |     |  |   |           |           |           |           |           |           |
|--|--------------------------------|-----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Penyusunan Perencanaan Program | 99  | Tersusunnya Renja Dinas Kesehatan sesuai standar   | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 100 | Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan sesuai standar   | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 101 | Tersusunnya Rekapitulasi Usulan Dinas Kesehatan  | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 102 | Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan sesuai standar   | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 103 | Cakupan Puskesmas dan UPTD lainnya yang menyusun Renstra/Perencanaan Lima tahunan dan Renja/Perencanaan Tahunan sesuai standar | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
| 2  | Pengelolaan Data dan Informasi | 104 | Tersusunnya Profil Kesehatan sesuai standar  | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 105 | Tersusunnya laporan SPM Dinas Kesehatan sesuai standar   | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
| 2  | Evaluasi dan Pelaporan         | 106 | Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan sesuai standar   | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 107 | <b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai opini SAKIP</b>   | % | <b>BB</b> | <b>BB</b> | <b>BB</b> | <b>BB</b> | <b>BB</b> | <b>BB</b> |
|  |                                | 108 | Tersusunnya LKPJ Dinas Kesehatan sesuai standar  | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
|  |                                | 109 | Tersusunnya LPPD Dinas Kesehatan sesuai standar  | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |
| 2). Sub Bagian Keuangan, Akunting dan Aset |                                |     |  |   |           |           |           |           |           |           |
|  | Penatausahaan                  | 110 | Ketepatan waktu pembayaran gaji ASN  | % | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 100.0     |

|   |                             |     |  |   |           |              |              |              |              |              |
|---|-----------------------------|-----|--|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | keuangan                    | 111 | Cakupan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)   | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|   |                             | 112 | Cakupan dokumen Neraca Keuangan  | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|   |                             | 113 | Cakupan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)   | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| 3) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum |                             |     |  |   |           |              |              |              |              |              |
| 1   | Pengelolaan kepegawaian     | 114 | Cakupan pelayanan kenaikan Pangkat pegawai   | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|   |                             | 115 | Cakupan pelayanan kenaikan gaji berkala  | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|   |                             | 116 | Cakupan kehadiran pegawai sesuai jam kerja   | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| 2)  | Pengelolaan Umum dan Hukum  | 117 | <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>  | % | <b>68</b> | <b>70,00</b> | <b>75,00</b> | <b>75,00</b> | <b>80,00</b> | <b>85,00</b> |
|   |                             | 118 | Kelengkapan SIMBADA Puskesmas dan Dinas Kesehatan  | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|   |                             | 119 | Cakupan pegawai yang mendapat pembinaan hukum kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya | % | 100.0     | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| F   | UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) |     |  |   |           |              |              |              |              |              |
| 1)  | Puskesmas                   | 120 | Cakupan 6 pelayanan dasar (basic six)  | % | 100       | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|   |                             | 121 | Cakupan upaya pelayanan pengembangan sesuai kemampuan sumber daya dan potensi wilayah              | % | 100       | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |

|    |                        |     |   |                    |           |           |           |           |           |           |
|----|------------------------|-----|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                        | 122 | <b>Rerata capaian SPM bidang kesehatan</b>                                  | %                  | <b>68</b> | <b>70</b> | <b>73</b> | <b>75</b> | <b>75</b> | <b>80</b> |
|    |                        | 123 | Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian neonatal                        | %                  | 50        | 30        | 25        | 30        | 40        | 50        |
|    |                        | 124 | Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian bayi                            | %                  | 45        | 30        | 20        | 30        | 40        | 50        |
|    |                        | 125 | Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian balita                          | %                  | 90        | 70        | 85        |           |           |           |
|    |                        | 126 | % Puskesmas dengan tidak ada kematian ibu                                   | %                  | 20        | 45        | 15        | 20        | 30        | 50        |
|    |                        | 127 | Cakupan Puskesmas dengan tindak lanjut kematian ibu dan bayi dengan AMP/RMP | %                  | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2) | Perbekalan Kesehatan   | 128 | Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial                       | %                  | 90        | 90        | 97,67     | 95        | 95        | 95        |
|    |                        | 129 | Cakupan distribusi Obat dan Vaksin Esensial ke puskesmas                    | %                  | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3) | Laboratorium Kesehatan | 130 | Angka kesalahan laporan hasil pemeriksaan laboratorium 0%                   | Kasus              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|    |                        | 131 | Peningkatan pencapaian jumlah pemeriksaan, 20% per tahun                    | Jumlah pemeriksaan | 12.383    | 14.860    | 17.832    | 21.398    | 25.678    | 30.813    |
|    |                        | 132 | Prosentase jumlah alat lab terkalibrasi ≥ 75%                               | %                  | 75        | 80        | 85        | 90        | 90        | 95        |
|    |                        | 133 | Prosentase tersediaan reagen lab  | %                  | 80        | 85        | 90        | 95        | 95        | 98        |
|    |                        | 134 | Parameter pemeriksaan laboratorium  | %                  | 10        | 12        | 14        | 16        | 16        | 18        |

|  |     |  |   |    |    |    |    |    |    |
|--|-----|--|---|----|----|----|----|----|----|
|  |     | yang terakreditasi   |   |    |    |    |    |    |    |
|  | 135 | Prosentase Jenis Parameter/pemeriksaan yang mengikuti PME/Uji Banding/Uji silang | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |
|  | 136 | Tingkat kepuasan Pelanggan   | % | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 | 85 |

Berdasarkan indikator program dan target kinerja Dinas Kesehatan yang selanjutnya dijabarkan dengan bidang/sekretariat, seksi/ sub bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan maka disusun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2023   |  |  |                                       |                      |             |                        | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |                              |   |             |             |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja   |  |                                       | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |                              |   |             |             |
|      |  |                   |                       |                |  | Prgrm  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kgiatn                          |                      |             | Tolok Ukur             |              |                                      | Target                       |   |             |             |
| 1    |  |                   |                       |                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                                       |                      |             |                        |              |                                      |                              |   |             |             |
| 1    |  |                   |                       |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |  |  |                                       |                      |             |                        |              |                                      |                              | 259.957.008.587   |             |             |
| 1    | 2  | 1                 |                       |                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |  |  |                                       |                      |             |                        |              |                                      |                              | 109.397.025.318   |             |             |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |                                       |                      |             |                        |              |                                      |                              | 508.750.000   |             |             |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  | 1              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta       | B Opini;85% | 2 Dokumen              | 75 %         | 262.500.000                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 288.750.000 |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  | 2              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD                | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta       | B Opini;85% | 2 dokumen              | 75 %         | 25.000.000                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 27.500.000  |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  | 3              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta       | B Opini;85% | 2 Dokumen              | 75 %         | 25.000.000                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 27.500.000  |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  | 4              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD           | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta       | B Opini;85% | 2 Dokumen              | 75 %         | 25.000.000                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 27.500.000  |
| 1    | 2  | 1                 | 2.01                  | 5              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta       | B Opini;85% | 1 Laporan              | 75 %         | 25.000.000                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 27.500.000  |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |   |                        |                |                                      |
|------|---|---|------|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |                | Pagu Indikatif (Rp.)  | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                |   |   | Tolok Ukur             | Target         |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 50.000.000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 55.000.000     |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 50.000.000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 55.000.000     |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |                | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%   | <b>56.084.329.376</b>  |                |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 578 orang/bulan       | 75 %         | 50.795.753.979 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 55.875.329.376 |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Dokumen             | 75 %         | 60.000.000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 66.000.000     |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 70.000.000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 77.000.000     |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                      |                                      |
|------|---|---|------|----|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |              | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |              |                                   |   | Tolok Ukur             | Target               |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 6  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Dokumen             | 75 %         | 35.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 38.500.000           |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 25.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 27.500.000           |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        | <b>55.000.000</b>    |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.03 | 5  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 50.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 55.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        | <b>82.500.000</b>    |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 50.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 55.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Orang               | 75 %         | 25.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 27.500.000           |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 |    | <b>Administrasi</b>   |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        | <b>1.143.500.000</b> |                                      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |             |                                      |
|------|---|---|------|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja  |             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |  |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur  | Target      |                                      |
|      |   |   |      |   | Umum Perangkat Daerah  |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |   |             |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 75.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 82.500.000                           |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 50.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 55.000.000                           |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 85.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 93.000.000                           |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 200.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 220.000.000                          |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan                          | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Paket               | 75 %         | 200.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 220.000.000                          |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 80.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85% | 88.000.000                           |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                      |                                      |
|------|---|---|------|----|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |               | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |  |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |               |                                   |   | Tolok Ukur             | Target               |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Laporan             | 75 %         | 250.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 275.000.000          |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD         | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 Dokumen             | 75 %         | 100.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 110.000.000          |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        | <b>2.585.000.000</b> |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah paket mebel yang disediakan   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 300.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 330.000.000          |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                              | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 100.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 110.000.000          |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor                                       | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 unit                | 75 %         | 750.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 825.000.000          |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 1.200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 1.320.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>   |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        | <b>3.971.803.000</b> |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |               |                                      |
|------|---|---|------|----|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |               | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |               |                                   |   | Tolok Ukur             | Target        |                                      |
|      |   |   |      |    | <b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        |               |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 1.010.730.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 1.111.803.000 |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 2.600.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 2.860.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        |               |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 20 unit               | 75 %         | 262.500.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 288.750.000   |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah unit gedung kantor  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 unit                | 75 %         | 5.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 5.500.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 unit                | 75 %         | 200.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini;85%            | 220.000.000   |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                       |                                      |
|------|---|---|------|----|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |               | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |  |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |               |                                   |   | Tolok Ukur             | Target                |                                      |
| 1    | 2 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran         | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | B Opini;85%            | 1 unit                | 75 %         | 200.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran           | B Opini;85%            | 220.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        | <b>74.260.125.000</b> |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 |    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |               |                                   |   |                        | <b>19.630.000.000</b> |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 3  | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 3 unit                | 75 %         | 2.600.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 2.860.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 9  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi                                 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 3 unit                | 75 %         | 6.500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 7.150.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan                                   | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 5 paket               | 75 %         | 1.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 1.100.000.000         |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                       | Catta Pnting                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                        |                       |                                      |
|------|---|---|------|----|---|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.)  |                               | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |  |   |  |                        | Prgm                   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                       |                               |   | Tolok Ukur             | Target                |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 2.000.000.000         | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 2.200.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 500.000.000           | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 550.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat. Vaksin  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah obat . vaksin yang disediakan  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 3.000.000.000         | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 3.500.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah bahan habis pakai yang disediakan  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 1.000.000.000         | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 1.500.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 400.000.000           | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 440.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah distribusi alat kesehatan. obat. vaksin. bahan medis habis pakai (BMHP)                          | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 300.000.000           | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 |    | <b>Penyediaan Layanan</b>   |  |   |  |                        |                        |                       |              | <b>47.243.130.000</b> |                               |   |                        | <b>53.970.125.000</b> |                                      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja  |   |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                       |                                      |
|------|---|---|------|---|---|--|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja  |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |   |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur  | Target                |                                      |
|      |   |   |      |   | Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |   |                                       |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |   |                       |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                         | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah ibu hamil yang mendapatkan kesehatan sesuai standar                            | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 19300 orang           | 75 %         | 350.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 385.000.000                          |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                      | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah ibu bersalin yang mendapatkan kesehatan sesuai standar                         | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 18422 orang           | 75 %         | 300.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 330.000.000                          |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 17545 orang           | 75 %         | 300.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 330.000.000                          |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                            | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 87033 orang           | 75 %         | 300.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 330.000.000                          |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar        | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar      | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 48765 orang           | 75 %         | 300.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 330.000.000                          |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif               | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;80%               | 48765 orang           | 75 %         | 300.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 330.000.000                          |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |             |                                      |
|------|---|---|------|----|--|--|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |              | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |  |  |  |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |              |                                   |   | Tolok Ukur             | Target      |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 7  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                             | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 23595 orang           | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 8  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 52320 orang           | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 9  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 12222 orang           | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar        | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1361 orang            | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah orang terduga menderit a tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standarmendapatka n | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 11117 orang           | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah orang terduga menderit a HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                      | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 23109 orang           | 75 %         | 250.000.000  | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 275.000.000 |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                |                                      |
|------|---|---|------|----|---|--|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |               | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |  |  |  |                        | Prgm                   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |               |                                   |   | Tolok Ukur             | Target         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 9.500.000.000 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 12.500.000.000 |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 1.030.000.000 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 1.100.000.000  |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 50.000.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 55.000.000     |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 300.000.000   | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 25.000.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 27.500.000     |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya                     | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 26.250.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 28.875.000     |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                |                                      |
|------|---|---|------|----|--|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |                | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |  |  |   |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                |                                   |   | Tolok Ukur             | Target         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 367.500.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 404.250.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)       | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1361 orang            | 75 %         | 157.500.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 173.250.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah orang dengan kesehatan jiwa dan NAPZA  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1361 orang            | 75 %         | 630.000.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 693.000.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 500.000.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 550.000.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 200.000.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 220.000.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular                           | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 157.500.000    | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 173.250.000    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 Dokumen             | 75 %         | 30.049.380.000 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)     | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 33.000.000.000 |                                      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                    |                                      |
|------|---|---|------|----|---|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |              | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |  |   |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |              |                                   |   | Tolok Ukur             | Target             |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah            | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | jumlah dokumen hasil deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 paket               | 75 %         | 300.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 330.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                       | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 dokumen             | 75 %         | 150.000.000  |                                   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 165.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 31 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                      | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan                           | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 0 Dokumen             | 75 %         | 100.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 150.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota          | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                 | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 20 unit               | 75 %         | 100.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 110.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 |    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b> |  |   |  |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        | <b>330.000.000</b> |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 | 1  | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                              | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 dokumen             | 75 %         | 50.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 55.000.000         |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 | 2  | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 dokumen             | 75 %         | 50.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 55.000.000         |                                      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                       |                                      |
|------|---|---|------|---|--|--|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |                       | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |  |  |  |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                       |                                   |   | Tolok Ukur             | Target                |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.03 | 3 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                      | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 7 unit                | 75 %         | 200.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 220.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 |   | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a</b> |  |  |  |                        |                        |                       |              | <b>300.000.000</b>    |                                   |   |                        | <b>330.000.000</b>    |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 unit                | 75 %         | 100.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 110.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan  | Cakupan Tingkat ketersediaan obat dan vaksin esensial;Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 95 %;8 0%              | 1 dokumen             | 75 %         | 200.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 220.000.000           |                                      |
| 1    | 2 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   |  |  |  |                        |                        |                       |              | <b>13.926.625.000</b> |                                   |   |                        | <b>15.319.287.500</b> |                                      |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 |   | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kot a</b>                                      |  |  |  |                        |                        |                       |              | <b>100.000.000</b>    |                                   |   |                        | <b>110.000.000</b>    |                                      |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 | 1 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Perizinan praktik tenaga kesehatan                               | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 50.000.000            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan  | 100 %                  | 55.000.000            |                                      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                          |   |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |        |                                      |
|------|---|---|------|---|---|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program                            | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja                     |        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |   |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur                                 | Target |                                      |
| 1    | 2 | 3 | 2.01 | 2 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                          | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 2 dokumen             | 75 %         | 50.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | 100 %  | 55.000.000                           |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 |   | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a</b> |  |   |  |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |  |        | <b>14.984.062.500</b>                |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 1 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan                        | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 50.280.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | 100 %  | 55.308.000                           |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)               | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 412 orang             | 75 %         | 13.522.655.000       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | 100 %  | 14.874.920.500                       |
| 1    | 2 | 3 | 2.02 | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 2 dokumen             | 75 %         | 48.940.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | 100 %  | 53.834.000                           |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 |   | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a</b>   |  |   |  |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |  |        | <b>225.225.000</b>                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                          |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024          |                        |                    |                                      |
|------|---|---|------|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program                            | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                                | Target Capaian Kinerja |                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |  | Tolok Ukur             | Target             |                                      |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu/kompetensinya  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 250 orang             | 75 %         | 204.750.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | 100 %                  | 225.225.000        |                                      |
| 1    | 2 | 4 |      |   | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>  |  |  |                                       |                        |                        |                       |              |                      |                              |  |                        | <b>622.000.000</b> |                                      |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 |   | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |  |  |                                       | Kab Purwakarta         |                        |                       |              | 100.000.000          |                              |  |                        | 110.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 100.000.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina         | 100 %                  | 110.000.000        |                                      |
| 1    | 2 | 4 | 2.02 |   | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu                    |  |  |                                       |                        |                        |                       |              | 439.500.000          |                              |  |                        | 449.500.000        |                                      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                  |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                                    |        |                                      |
|------|---|---|------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program                    | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja             |        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |                                    |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur                         | Target |                                      |
|      |   |   |      |   | <b>Perusahaan Rumah Tangga</b>  |                                    |  |                                       |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |                                    |        |                                      |
| 1    | 2 | 4 | 2.02 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga  | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 439.500.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | 100 %  | 449.500.000                          |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 |   | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>   |                                    |  |                                       |                        |                        |                       |              | 25.000.000           |                              |                                   |                                    |        | 35.000.000                           |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 25.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | 100 %  | 35.000.000                           |
| 1    | 2 | 4 | 2.05 |   | <b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan</b>   |                                    |  |                                       | Kab Purwakarta         |                        |                       |              | 25.000.000           |                              |                                   |                                    |        | 27.500.000                           |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                           |  |  | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |         |                                      |
|------|---|---|------|---|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian Program                             | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja                      |         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |   |  |  |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur                                  | Target  |                                      |
|      |   |   |      |   | Sentra Makanan Jajanan  |   |  |  |                        |                        |                       |              |                      |                              |                                   |   |         |                                      |
| 1    | 2 | 4 | 2.05 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 100 %                  | 1 dokumen             | 75 %         | 25.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina          | 100 %   | 27.500.000                           |
| 1    | 2 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   |   |  |  |                        |                        |                       |              | 550.000.000          |                              |                                   |   |         | 665.000.000                          |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 |   | Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a      |   |  |  |                        |                        |                       |              | 25.000.000           |                              |                                   |   |         | 27.500.000                           |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Meningkatny a mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 65.16 %                | 1 dokumen             | 75 %         | 25.000.000           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | 65.16 % | 27.500.000                           |
| 1    | 2 | 5 | 2.02 |   | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a  |   |  |  |                        |                        |                       |              | 500.000.000          |                              |                                   |   |         | 610.000.000                          |

| Kode |    |    |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                           |  |                                       | Rencana Tahun 2023     |                        |                       |              | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |                        |                   |                                      |
|------|----|----|------|---|---|---|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |   |   | Capaian Program                             | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |              |              | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber Dana                                 | Target Capaian Kinerja |                   | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |    |    |      |   |   |   |  |                                       |                        | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |              |                                   |   | Tolok Ukur             | Target            |                                      |
| 1    | 2  | 5  | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 65.16 %                | 1 dokumen             | 75 %         | 100.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | 65.16 %                | 110.000.000       |                                      |
| 1    | 2  | 5  | 2.02 | 2 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 65.16 %                | 0 Keluarga            | 75 %         | 400.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | 65.16 %                | 500.000.000       |                                      |
| 1    | 2  | 5  | 2.03 |   | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                          |   |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        | <b>27.500.000</b> |                                      |
| 1    | 2  | 5  | 2.03 | 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | Kab Purwakarta         | 65.16 %                | 1 dokumen             | 75 %         | 25.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | 65.16 %                | 27.500.000        |                                      |
| 1    | 2  | 1  |      |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   |   |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        |                   |                                      |
|      | 02 | 01 | 2.10 |   | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   |   |  |                                       |                        |                        |                       |              |              |                                   |   |                        |                   |                                      |

| Kode |  |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja  |  |                                  | Rencana Tahun 2023  |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |              |                                      |
|------|--|----|------|----|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
|      |  |    |      |    |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                   | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |                              | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja   |              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |  |    |      |    |  |  |  |                                  |   | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |                              |                                   | Tolok Ukur   | Target       |                                      |
| 02   |  |    | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                             |  |  |                                  |   |                        |                       |              |                      |                              |                                   |  |              | 38.737.392.942                       |
|      |  | 02 |      | 1  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Purwakarta) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih        | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 1.646.663.275        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85% | 1.811.329.603                        |
|      |  |    |      | 2  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Munjuljaya) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 1.332.629.550        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85% | 1.465.892.505                        |
|      |  |    |      | 3  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Marancang)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Marancang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap  | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 892.110.750          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85% | 981.321.825                          |
|      |  |    |      | 4  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Mulyamekar) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwaring, Cigelam              | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 986.522.700          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85% | 1.085.174.970                        |
|      |  |    |      | 5  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Jatiluhur)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                               | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 1.871.139.000        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85% | 2.058.252.900                        |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2023               |   |                       |              |                      |               | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |                                      |               |
|------|--|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja                        |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana   |                              | Target Capaian Kinerja            |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |               |
|      |  |   |  |  |                                  | Prgrm   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |               |                              | Tolok Ukur                        | Target   |                                      |               |
|      | 6  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Campaka)     | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan     | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 1.578.429.450 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.736.272.395 |
|      | 7  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bungursari)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan  | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 971.356.500   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.068.492.150 |
|      | 8  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Cibatu)      | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan      | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 1.347.796.900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.482.576.590 |
|      | 9  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan   | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 1.782.702.950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.960.973.245 |
|      | 10   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 1.185.745.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.304.319.830 |
|      | 11   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan    | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.247.989.238 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 2.472.788.162 |
|      | 12   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan  | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 1.139.012.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.252.913.420 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2023               |   |                       |              |                      |               | Catta Pnting                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |                                      |               |
|------|--|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan   | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja                      |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana   |                              | Target Capaian Kinerja            |  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |               |
|      |  |   |  |  |                                  | Prgrm                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |               |                              | Tolok Ukur                        | Target   |                                      |               |
|      | 13   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukatani)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan  | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.833.355.626 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 3.116.691.189 |
|      | 14   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Darangdan) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.741.378.626 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 3.015.516.489 |
|      | 15   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bojong)    | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan    | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.109.206.700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 2.320.127.370 |
|      | 16   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Plered)    | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan    | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 3.632.292.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 3.995.521.750 |
|      | 17   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Tegalwaru) | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.843.652.700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 3.128.017.970 |
|      | 18   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Manis)     | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Manis, Semua Kelurahan     | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 2.127.046.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 2.339.750.930 |
|      | 19   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Sukasari)  | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan  | B; 80 Opini; Persen   | 1 unit kerja | 75%                  | 922.162.500   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | B Opini; 85%                         | 1.014.378.750 |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja   |  |                                       | Rencana Tahun 2023   |                        |                       |              |                      | Catta Pnting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                        |                |                                      |
|------|----|----|------|----|--|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |    |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |                       |              | Pagu Indikatif (Rp.) |   | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |    |    |      |    |  |   |  |                                       |  | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |                      |   |   | Tolok Ukur             | Target         |                                      |
|      |    |    |      | 20 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Koncara)                              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran          | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD      | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar      | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 859.244.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran          | B Opini; 85%           | 945.168.400    |                                      |
|      |    |    |      | 21 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Laboratorium Kesehatan)                         | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran          | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Meningkatnya mutu pelayanan BLUD      | Kab Purwakarta   | B; 80 Opini; Persen    | 1 unit kerja          | 75%          | 165.375.000          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran          | B Opini; 85%           | 181.912.500    |                                      |
|      | 02 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T</b>         |   |  |                                       |  |                        |                       |              |                      |   |   |                        | 311.072.580    |                                      |
|      | 02 | 02 | 2,02 |    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a</b> |   |  |                                       |  |                        |                       |              |                      |   |   |                        | 311.072.580    |                                      |
|      | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                                       |  |                        |                       |              | 20.500.726.000       |   |   |                        | 57.918.378.189 |                                      |
|      |    |    |      | 1  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Purwakarta)                                  | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas                         | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikidul, Nagritengah, Sindangkasih | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun               | 75 persen    | 1.090.293.000        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 2.444.628.375  |                                      |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |   |                                     | Rencana Tahun 2023                    |   |                        |              |                      |               |   | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                       |               |
|------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|---------------|---|--------------|---|-----------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                      | Lokasi Output Kegiatan                | Target Capaian Kinerja  |                        |              | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja                    |              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)  |                       |               |
|      |  |   |   |                                     |                                       | Pgrgm   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kgiatn |                      |               | Tolok Ukur                                |              |   | Target                |               |
|      | 2  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Munjuljaya) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Munjuljaya, Tegalmunjul, Ciseureuh, Citalang | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.036.535.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 1.869.410.025 |
|      | 3  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Marancang)  | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Marancang, Hegarmanah, Cicadas, Cilangkap  | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 975.551.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 2.504.571.697 |
|      | 4  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mulyamekar) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Babakancikao, Mulyamekar, Ciwareng, Cigelam              | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 862.962.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 1.792.641.848 |
|      | 5  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Jatiluhur)  | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Jatiluhur, Semua Kelurahan                               | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.054.729.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 1.965.422.340 |
|      | 6  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Campaka)    | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan                                 | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.001.401.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 3.143.806.313 |
|      | 7  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bungursari) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan opsional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Bungursari, Semua Kelurahan                              | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.059.995.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 3.016.530.405 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023                    |   |                        |              |                      |               |   | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                       |               |
|------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|---------------|---|--------------|---|-----------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan                | Target Capaian Kinerja                        |                        |              | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja                    |              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)  |                       |               |
|      |  |  |   |  |                                       | Prgrm   | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kgiatn |                      |               | Tolok Ukur                                |              |   | Target                |               |
|      |  | Esensial   |   |  |                                       |   |                        |              |                      |               |   |              |   |                       |               |
|      | 8  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Cibatu)      | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Cibatu, Semua Kelurahan      | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.059.301.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 1.883.577.150 |
|      | 9  | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pasawahan)   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan   | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.062.030.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 2.708.862.345 |
|      | 10   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pondoksalam) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Pondoksalam, Semua Kelurahan | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 954.697.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 2.649.270.015 |
|      | 11   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Wanayasa)    | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Wanayasa, Semua Kelurahan    | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.064.184.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 2.115.719.550 |
|      | 12   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kiarapedes)  | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Kiarapedes, Semua Kelurahan  | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.004.593.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 3.732.337.350 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023                    |   |                        |              |                      |               |   | Catta Pnting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                       |               |
|------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|----------------------|---------------|---|--------------|---|-----------------------|---------------|
|      |  | Capaian Program  | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan                         | Lokasi Output Kegiatan                | Target Capaian Kinerja                      |                        |              | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja                    |              | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)  |                       |               |
|      |  |  |   |  |                                       | Prgrm                                       | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kgiatn |                      |               | Tolok Ukur                                |              |   | Target                |               |
|      | 13   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukatani)  | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kelurahan  | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.118.852.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 2.051.659.890 |
|      | 14   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Darangdan) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Darangdan, Semua Kelurahan | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.071.366.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 3.766.979.003 |
|      | 15   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bojong)    | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Bojong, Semua Kelurahan    | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.008.631.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 4.383.203.738 |
|      | 16   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Plered)    | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Plered, Semua Kelurahan    | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.119.571.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 3.972.980.025 |
|      | 17   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Tegalwaru) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Tegalwaru, Semua Kelurahan | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 1.117.057.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 4.737.819.555 |
|      | 18   | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Maniis)    | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Maniis, Semua Kelurahan    | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun      | 75 persen            | 978.978.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF |              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen | 4.675.614.300 |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja   |   |                                       | Rencana Tahun 2023  |                        |                       |              | Catta Pnting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024         |   |                        |               |                                      |
|------|----|----|------|----|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
|      |    |    |      |    |   | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                         | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan  | Target Capaian Kinerja |                       |              |               | Pagu Indikatif (Rp.)                      | Sumber Dana   | Target Capaian Kinerja |               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |    |    |      |    |   |   |   |                                       |   | Prgrm                  | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kgiatn |               |   |   | Tolok Ukur             | Target        |                                      |
|      |    |    |      | 19 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Sukasari)                       | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas        | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Sukasari, Semua Kelurahan                    | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun               | 75 persen    | 878.013.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 2.866.012.695 |                                      |
|      |    |    |      | 20 | Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Koncara)                        | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | jumlah kebutuhan operasional puskesmas        | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagrikaler, Cipaisan, Purwamekar | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun               | 75 persen    | 981.987.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), JKN, DAK NF | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 1.637.331.570 |                                      |
|      | 02 | 02 | 2,02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                               |   |   |                                       |   |                        |                       |              |               |   |   |                        | 1.775.192.580 |                                      |
|      |    |    |      |    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Perbekalan Kesehatan)   | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | terpenuhinya kebutuhan operasional kesehatan  | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan             | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun               | 75 %         | 300.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 311.072.580   |                                      |
|      |    |    |      |    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Laboratorium Kesehatan) | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | terlaksananya kebutuhan operasional kesehatan | Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan | Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan             | 75; 95 Persen ; Persen | 1 tahun               | 75 %         | 1.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan; Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 75; 95 Persen; Persen  | 1.464.120.000 |                                      |

## **BAB** **PENUTUP**



Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja atau disingkat Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022 merupakan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Dinas Kesehatan disusun dan ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2022 dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, multifaktor, berlangsung cepat, pesat, dan tidak menentu.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2018-2023. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan lampiran 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dengan demikian diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan selama satu tahun ke depan. Untuk itu dalam melaksanakan rencana kerja Dinas kesehatan tahun 2022, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

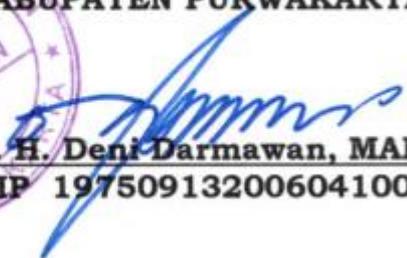
1. Renja Dinas kesehatan merupakan tahap pertama (P1) dalam pencapaian program kesehatan sehingga harus diikuti dengan tahap kedua berupa penggerakan pelaksanaan (P2) yang konsisten dan akuntabel serta didukung oleh pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang efektif dan optimal.

2. Besaran anggaran dalam Renja ini tidak bersifat mutlak karena masih mungkin berubah sesuai dengan perkembangan dan penetapan anggaran termasuk kemungkinan adanya anggaran perubahan .
3. Dalam pelaksanaan kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen harus melaporkan hasil kegiatannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan baik laporan keuangan maupun pencapaian fisik kegiatannya.
4. Pada akhir kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen harus melaporkan hasil akhir kegiatannya dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5. Untuk mencapai hasil yang optimal sehingga tepat anggaran dan tetap sasaran maka peran serta lintas program dan lintas sektor baik masyarakat, swasta, LSM maupun stakeholder lainnya harus menjadi prioritas utama dan pertama karena kesehatan adalah hak asasi, investasi dan milik bersama serta kegiatan yang kompleks dan multifaktor sehingga dukungan tersebut menjadi sangat mutlak dan memudahkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Agar Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, perlu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di

lingkungan Dinas Kesehatan. Dengan penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Renja tahun 2022 ini.

 **KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,**  
  
**dr. H. Deni Darmawan, MARS**  
**NIP 197509132006041008**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**TAHUN 2021**